



INSPEKTORAT

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)**



TAHUN



Title Heading

Subtitle Text Here

To get started right away, just tap any placeholder text (such as this) and start typing to replace it with your own.

Want to insert a picture from your files or add a shape, text box, or table? You got it! On the Insert tab of the ribbon, just tap the option you need.

“Find even more easy-to-use tools on the Insert tab, such as to add a hyperlink or insert a comment”

To get started right away, just tap any placeholder text (such as this) and start typing to replace it with your own.

Want to insert a picture from your files or add a shape, text box, or table? You got it! On the Insert tab of the ribbon, just tap the option you need.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan karuniaNya sehingga dapat terlaksana penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap akhir tahun untuk disampaikan kepada Bupati Berau melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Berau. Sebagai bentuk pertanggungjawaban formal atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang berkaitan dengan visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat ini merupakan gambaran realisasi kinerja capaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Berau, sekaligus sebagai bahan untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Melalui Laporan kinerja ini diharapkan adanya optimalisasi peran inspektorat dalam mewujudkan Good Governance dan clean governance.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat, mudah-mudahan bisa menjadi bahan informasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Inspektorat Kabupaten Berau.

Inspektorat Kabupaten Berau



Ir. H. Riza Fakhmi
Pembina TK.I
NIP. 19671001 199803 1 007



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Berau setiap akhir tahun menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai pertanggungjawaban formal kepada Bupati, melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.

LKjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Inspektorat Kabupaten Berau ini, memuat visi, misi, pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja yang direncanakan. (sesuai dengan SK LAN No. 239/ IX/ 6/ 8/ 2003 tanggal 25 Maret 2003).

Fokus laporan ini adalah pencapaian tujuan/ sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting. Inspektorat Kabupaten Berau mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
2. Mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Sasaran : 1. Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;
2. Menurunnya temuan audit kinerja OPD dibawah target.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja program dan evaluasi kinerja kegiatan maka prestasi yang dicapai Inspektorat Kabupaten Berau tahun 2019 dengan Predikat : A "sangat berhasil" (100 %).

Demikian LKjIP ini dibuat, mudah – mudahan bisa sebagai media komunikasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Inspektorat Kabupaten Berau.

Inspektorat Kabupaten Berau

Inspektur,

Ir.H.Riza Fakhmi
Pembina TK.I
NIP. 19671001 199803 1 007



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	iiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	4
1.4. Sumber Daya Manusia	4
1.5. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis	12
2.1.1. Visi dan Misi	12
2.1.1. Tujuan Dan Sasaran	13
2.1.3. Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program.....	14
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	17
2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT)	19
2.4. Perjanjian Kinerja (PK)	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	30
3.2. Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	32
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	37
3.3.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini (Sasaran 1)	44
3.3.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu (Sasaran 1)	44
3.3.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun	



Ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (Sasaran 1)	45
3.3.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Sasaran 1).....	45
3.3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan,Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan (Sasaran 1)	45
3.3.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (Sasaran 1)	47
3.3.7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja (Sasaran 1)	47
3.3.8. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini (Sasaran 2)	53
3.3.9. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu (Sasaran 2)	54
3.3.10. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (Sasaran 2)	55
3.3.11. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Sasaran 2).....	55
3.3.12. Analisis Penyebab Keberhasilan,Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan (Sasaran 2)	56
3.3.13. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (Sasaran 2)	57
3.3.14. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja (Sasaran 2)	57
3.4 Realisasi Anggaran	58
BAB IV PENUTUP	48



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Urut Kepangkatan.....	5
Tabel 1.2	Daftar Tenaga Kontrak Inspektorat.....	10
Tabel 2.1	Arah Kebijakan Inspektorat Kabupaten Berau.....	15
Tabel 2.2	Review Indikator Kinerja Utama.....	18
Tabel 2.3	Rencana Kerja Tahun.....	19
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Berau.....	28
Tabel 2.5	Sasaran Strategis,Program dan Anggaran Tahun 2019	29
Tabel 3.1	Rekomendasi Inspektorat Kab.Berau Tahun Sebelumnya	30
Tabel 3.2	Kriteria Skala Nilai Serapan Kinerja.....	31
Tabel 3.3	Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2016-2019.....	33
Tabel 3.4	Target dan Capaian Realisasi Indikator.....	35
Tabel 3.5	Realisasi Belanja Tidak Langsung	38
Tabel 3.6	Realisasi Belanja Langsung.....	38
Tabel 3.7	Sasaran 1 Strategis.....	44
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1.....	45
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Sasaran 1.....	45
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional Sasaran 1.....	46
Tabel 3.11	Capaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2016-2019.....	49
Tabel 3.12	Target dan Capaian Realisasi.....	50
Tabel 3.13	Perbandingan antara Target dan Realisasi.....	54
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016-2019.....	55
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Jangka Menengah.....	55
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Standar Nasional.....	56
Tabel 3.17	Belanja Tidak Langsung.....	59
Tabel 3.18	Belanja Langsung.....	59
Tabel 3.19	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Serta Jenis Kelamin & Pendidikan	59



Tabel 3.20	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	60
Tabel 3.21	Norma Jabatan Inspektorat Kabupaten Berau.....	61
Tabel 3.22	Sarana Kerja Inspektorat Kabupaten Berau.....	62
Tabel 3.23	Pengukuran Pencapaian Program Penunjang Indikator	65



DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan.
2. Perjanjian Kinerja.
3. Pengukuran Kinerja Tahunan.
4. Indikator Kinerja Utama.
5. Matrix Rencana Strategis.
6. Rencana Aksi.
7. Rangkuman Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.
8. Tabel Pengukuran Pencapaian Indikator dan Target Program.
9. Tabel Hasil Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Berau Tahun 2019.
10. Realisasi Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2019.
11. SOP.







BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Berau, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kabupaten, provinsi dan nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme



(KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Berau diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1. 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah fungsi Penunjang pengawasan

Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi Penunjang pengawasan dengan memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Inspektorat serta mengadakan hubungan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Berau menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan fungsi Penunjang pengawasan;
- b. Pelaksanaan kebijakan fungsi Penunjang pengawasan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas fungsi Penunjang Pengawasan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Berau.

Berdasar Peraturan Bupati Berau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Inspektorat Kabupaten Berau mempunyai Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

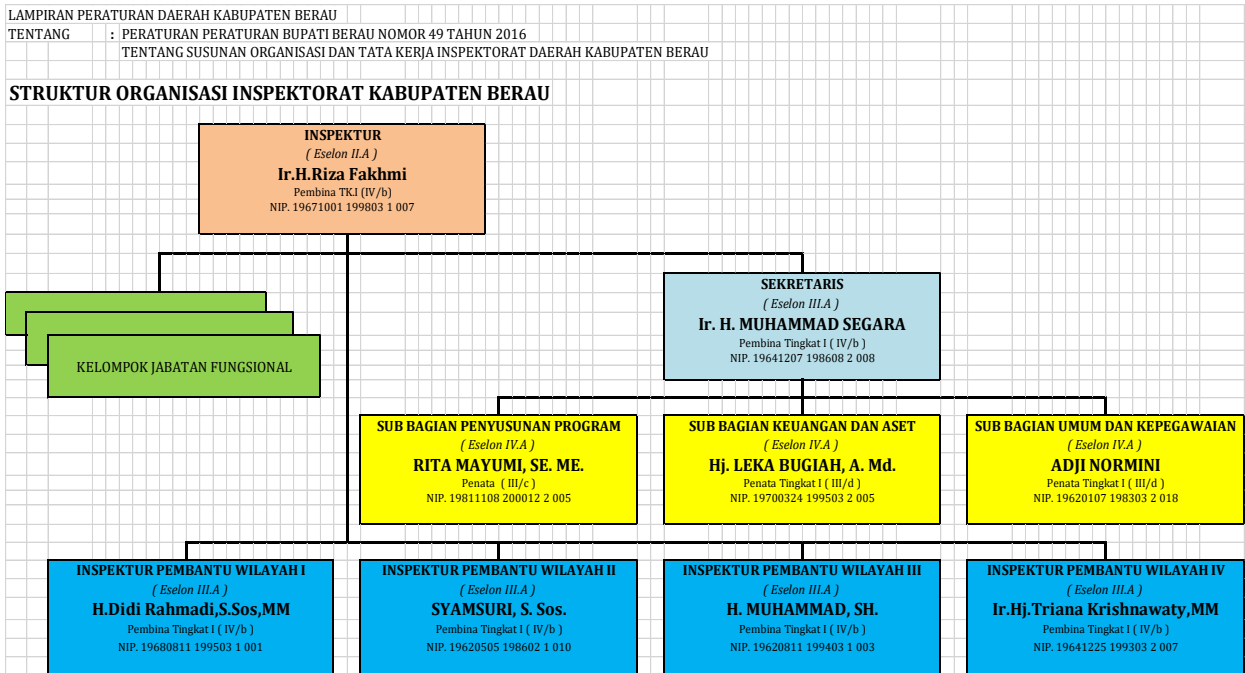
Berdasar Peraturan Bupati Berau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah. Susunan Organisasi Inspektorat Kab Berau terdiri dari

1. Inspektur
2. Sekretaris, membawahi:
 - Sub Bagian Penyusunan Program;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III;



6. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
7. Kelompok Jabatan Fungsional : - Auditor;
- Pengawas.

Adapun Bagan struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagai berikut :



1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang turut menentukan berhasil atau tidaknya capaian Kinerja yang ingin dicapai. Sumber daya manusia yang handal tetapi juga yang faham bagaimana bekerja dengan menerapkan 3E yaitu efektifitas, efisiensi, dan ekonomis sangatlah diperlukan. Bukan hanya dari segi jumlah tapi kualitas sumber daya manusia juga harus sesuai dengan kebutuhan yang ada . Untuk Inspektorat Kabupaten Berau dari kebutuhan 118 (seratus delapan belas) sumber daya manusia yang harus ada akan tetapi yang ada hanya 53 (Lima Puluh Tiga) Orang sehingga untuk sumber daya masih sangat kurang terutama untuk sarjana IT, arsitek dan Akuntansi. SDM Inspektorat dapat terlihat dalam Daftar Urut Kepangkatan berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

INSPEKTORAT

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PER DESEMBER 2019

NO	NAMA PEGAWAI TEMPAT / TANGGAL LAHIR	NOMOR INDIK PEGAWAI	PANGKAT		JABATAN			MASA KERJA		LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN TERAKHIR		AGAMA
			GOL/ RUANG	TMT	ESELON	NAMA JABATAN	TMT	THN	BLN	NAMA	TAHUN	NAMA JURUSAN	TAHUN LULUS	
1	Ir. H. Riza Fakhmi Martapura 1 Oktober 1967	19671001 199803 1 007	IV/b	01 April 2009	II/b	Inspektur	05/02/2019	21	4	Pra jabatan PIM IV PIM III	1998 2003 2011	S1 UNMUL Samarinda (Pertanian)	1992	Islam
2	Drs. Amir Hamzah, M.M Berau 28 April 1962	19620428 198603 1 010	IV/b	01 April 2011	-	Fungsional Auditor Madya	01/11/2018	28	4	ADUM ADUMLA PIM III	1996 1999 2003	S1 UNMUL Samarinda (Magister Manajemen)	2002	Islam
3	Muhammad, SH Tanjung Redeb 11 Agustus 1962	19620811 199403 1 003	IV/b	01 April 2011	III/a	IRBAN Wilayah III	31/12/2008	24	9	ADUM ADUMLA PIM III	1998 2000 2007	UNTAG Samarinda (Hukum)	1999	Islam
4	H. Didi Rahmadi, S.Sos, MM Teluk bayur 11 Agustus 1968	19680811 199503 1 003	IV/b	01 Oktober 2012	III/a	IRBAN Wilayah I	01/02/2019	29	7	PRAJAB ADUM ADUMLA PIM III	1996 1997 1999 2003	UNMUL Samarinda (Magister manajemen)	2002	Islam
5	Ir. Hj. Triana Krishnawaty, MM Yogyakarta Friday, December 25, 1964	19641225 199303 2 007	IV/b	01 April 2014	III/a	IRBAN Wilayah IV	01/02/2019	26	9	PRA JABATAN PIM IV PIM III	1993 2004 2010	S2 STIE IPWI Jakarta (Magister Manajemen)	1998	Islam
6	Ir. H. Muhammad Segara Banjarmasin Wednesday, March 23, 1966	19660323 199403 1 007	IV/b	01 April 2014	III/a	Sekretaris	17/12/2018	25	9	ADUM PIM III	1996 2009	UNLAM Banjarmasin (Manajemen Hutan)	1992	Islam
7	Suhardi, S.E Kulon Progo Tuesday, September 7, 1965	19650907 198602 1 010	IV/b	01 April 2019	-	Auditor Madya	01/01/2010	28	10	Pembentukan Auditor Ahli Penjurangan Auditor Muda Penjurangan Auditor Madya	2001 2008 2015	STIEM Tanjung Redeb (Manajemen)	1999	Islam
8	Syamsuri, S.Sos Teluk Bayur Saturday, May 5, 1962	19620505 198602 1 010	IV/b	01 Oktober 2019	III/a	IRBAN Wilayah II	17/12/2018	28	10	ADUM PIM III	1996 2009	Universitas Brawijaya Malang (Administrasi Negara)	2000	Islam
9	Drs. Achmad, M.M Tanjung Redeb Wednesday, October 28, 1964	19641028 198603 1 023	IV/a	01 Oktober 2009	-	Auditor Madya	18/05/2016	28	5	ADUMLA Pembentukan Auditor Ahli Matrikulasi Ketua Tim Penjurangan Auditor Madya PIM III	1999 2002 2005 2015 2009	UNMUL Samarinda (Manajemen SDM)	2002	Islam
10	Ir. Hj. Widya Astuti, M.P Samarinda Saturday, July 13, 1968	19680713 200003 2 004	IV/a	01/04/2015	-	Pengawas Pemerintahan Madya	10/12/2018	19	9	PIM IV PIM III Pembentukan P2UPD	2004 2016 2019	UNMUL Samarinda	2009	Islam



11	Madyansyah, S.T Samarinda Monday, April 20, 1970	19700420 200212 1 004	IV/a	01/10/2017	-	Auditor Madya	01/08/2017	20	7	Pembentukan Auditor Ahli Perjenjangan Ketua Tim Perjenjangan Auditor Madya	2010 2011 2016	UNTAG Samarinda (Teknik Sipil)	1998	Islam
12	Adji Normini Gunung Tabur Sunday, January 7, 1962	19620107 198303 2 018	III/d	01/10/2005	IV/a	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	12/01/2017	31	9	ADUM	1998	SMA Tanjung Redeb (IPA)	1981	Islam
13	Sri Hermina, S.Sos Tarakan Friday, August 30, 1963	19630830 199009 2 001	III/d	01/10/2007	-	Pengawas Pemerintahan Muda	12/12/2018	27	3	Pembentukan P2UPD	2019	STIA-LAN Ujung Pandang (Manajemen Pembangunan Daerah)		Islam
14	Rusman, S.T Mergosono Sunday, February 4, 1968	19680204 199002 1 004	III/d	01/04/2017	-	Auditor Muda	01/02/2017	24	10	PIM IV	2015	UNDIP Semarang (Teknik Sipil)	2003	Islam
15	H. Rosehan Anwar, SE.,MSi Tanjung Redeb Monday, April 20, 1970	19731204 199603 1 002	III/d	01/10/2017	-	Auditor Muda	01/11/2017	18	9	Pembentukan Auditor Ahli	2016	UNMUL Samarinda (Ekonomika Pembangunan dan Perencanaan)	2013	Islam
16	Haidir, S.E Pulau Derawan Friday, October 24, 1969	19691024 199903 1 007	III/d	01/04/2018	-	Auditor Muda	01/06/2016	17	9	Pembentukan Auditor Ahli Perjenjangan Auditor Muda	2014 2015	STIEM Tanjung Redeb (Manajemen)	2003	Islam
17	Haidir Maulana, S.P Gunung tabur Friday, May 21, 1976	19760521 200604 1 013	III/d	01/04/2018	-	Auditor Pertama	01/02/2019	17	7	Pembentukan Auditor Ahli	2018	UNMUL Samarinda (Budidaya Pertanian)	1999	Islam
18	Masrita Fatmasari, SP.,MSi Sungai Durian Monday, January 5, 1976	19760105 200604 2 003	III/d	01/10/2018	-	Auditor Muda	01/06/2016	16	3	Pembentukan Auditor Ahli Perjenjangan Auditor Muda	2014 2015	UNMUL Samarinda (Ilmu Lingkungan)	2013	Islam
19	Andi Setiawan, S.H Surabaya Wednesday, April 21, 1976	19760421 200502 1 002	III/d	01/04/2019	-	Auditor Muda	4/1/2014	14	10	Pembentukan Auditor Ahli Perjenjangan Auditor Muda	2010 2018	UMP Ponorogo (Hukum)	1999	Islam
20	Hj. Leka Bugiah, A.Md Tanjung Redeb Tuesday, March 24, 1970	19700324 199503 2 005	III/d	01/04/2019	IV/a	Kasubbag. Keuangan dan Aset	12/01/2017	22	8	ADUM	2000	UNMUL Samarinda (DIII Ekonomi Akuntansi)	1993	Islam
21	Ninik Roikhayati, S.E Tanjung Selor Tuesday, November 13, 1984	19841113 200803 2 005	III/d	01/04/2019	-	Auditor Muda	01/12/2016	10	9	Pembentukan Auditor Ahli Perjenjangan Auditor Muda	2011 2016	UNMUL Samarinda (Akuntansi)	2007	Islam
22	Andi Saefullah, S.E Buyung-Buyung Monday, June 25, 1979	19790625 200904 1 002	III/d	01/10/2019	-	Auditor Muda	01/12/2016	10	8	Pembentukan Auditor Ahli Perjenjangan Auditor Muda	2011 2016	UNMUL Samarinda (Ekonomi)	2005	Islam



23	Bayu Tri Buwono Sanery, S.Sos Berau Friday, December 18, 1981	19811218 201001 1 018	III/c	01/10/2015	-	Pengawas Pemerintahan Muda	12/11/2018	9	11	Pra Jabatan Pembentukan P2UPD	- 2019	UNPAS Bandung (Administrasi Bisnis)	2005	Islam
24	Tommy Yudha Sidharta, S.T Tanjung Redeb Monday, July 5, 1982	19820705 200803 1 002	III/c	01/04/2016	-	Auditor Muda	01/11/2017	11	9	Pembentukan Auditor Ahli	2016	UMY Yogyakarta (Pertambangan)	2004	Islam
25	Ari Sasmito, S.E Tanjung Redeb Sunday, September 21, 1975	19750921 199803 1 002	III/c	01/10/2016	-	Auditor Pertama	1/1/2010	19	9	Pembentukan Auditor Ahli Penjurangan Auditor Muda	2010 2018	UNMUL Samarinda (Akuntansi)	2006	Islam
26	Ira Nirmalasari, SSTP Samarinda Wednesday, September 18, 1985	19841113 200803 2 005	III/c	01/10/2016	-	Fungsional Umum	-	11	2	Pra Jabatan	2006	STPDN Jatinangor (Keuangan Daerah)	2008	Islam
27	Murni, S.T Pirang Monday, May 9, 1977	19770509 200901 2 004	III/c	01/04/2017	-	Auditor Muda	01/11/2017	15	1	Pembentukan Auditor Ahli	2016	UNHAS Ujung Pandang (Teknisk Sipil)	2002	Islam
28	Hendra Hermawan, S.E Bujangga Sunday, July 30, 1978	19780730 200904 1 002	III/c	01/10/2017	-	Auditor Muda	01/06/2016	10	8	Pembentukan Auditor Ahli Penjurangan Auditor Muda	2011 2016	UNMUL Samarinda (Akuntansi)	2004	Islam
29	Agus Hairudin, S.IP Tanjung Redeb Thursday, August 16, 1973	19730816 199303 1 003	III/c	01/10/2017	-	Pengawas Pemerintahan Muda	12/11/2018	21	9	Pra Jabatan Pembentukan P2UPD	1995 2019	Universitas Terbuka Samarinda (Ilmu Pemerintahan)	2017	Islam
30	Desy Ariatie, S.E Tanjung Redeb Sunday, December 2, 1979	19791202 200901 2 003	III/c	01/04/2018	-	Fungsional Umum	-	16	0	Pembentukan Auditor Ahli Audit Tingkat Dasar	2014 2015	UWGM Samarinda (Manajemen)	2002	Islam
31	Endra Kurniawan Cahyana, S.IP, M. AP Tanjung Redeb Monday, February 6, 1978	19780206 200901 1 002	III/c	01/04/2019	-	Auditor Muda	01/02/2019	16	3	Pembentukan Auditor Ahli Penjurangan Auditor Muda	2014 2018	UMY Yogyakarta (Ilmu Pemerintahan)	2002	Islam
32	Suwarni Kediri Sunday, July 9, 1967	19670709 199203 2 008	III/c	01/10/2019	-	Auditor Penyelia		22	9	Pembentukan Auditor Terampil	2007	SMEA Tulung Agung (Tata Usaha)	1987	Islam
33	Chairil Jafar, S.E Bibinoy Thursday, July 1, 1976	19760701 201001 1 005	III/c	01/10/2019	-	Auditor Muda	01/02/2019	9	11	Pembentukan Auditor Ahli Penjurangan Auditor Muda	2014 2018	STIEM Makassar (Manajemen)	2001	Islam
34	Rita Mayumi, SE, ME Gunung Tabur Sunday, November 8, 1981	19811108 200012 2 005	III/c	01/10/2019	IV/a	Kasubbag. Penyusunan Program	28/12/2018	14	0	Pra Jabatan	2001	UNMUL Samarinda (Ilmu Ekonomi)	2018	Islam



35	Nanik Tesukandar Ishak, S.Si Pare-Pare Thursday, January 15, 1987	19870115 201101 2 014	III/c	01/10/2019	-	Auditor Muda	01/02/2019	8	11	Pembentukan Auditor Ahli Penjurangan Auditor Muda	2014 2018	UNHAS Ujung Pandang (Farmasi)	2008	Islam
36	Hj. Jubaidah, S.E Samarinda Saturday, August 19, 1972	19720819 201001 2 002	III/b	01/04/2014	-	Auditor Muda	01/09/2019	14	11	Pembentukan Auditor Ahli Penjurangan Auditor Muda	2014 2018	UMM Malang (Manajemen)	1996	Islam
37	H. Iriansyah, K Sanga-Sanga Monday, January 15, 1962	19620115 199603 1 001	III/b	01/04/2014	-	Fungsional Umum	-	28	7	-	-	STM Samarinda (Bangunan)	1984	Islam
38	Hesty Lestari, SE.Ak Samarinda Sunday, March 29, 1981	19810329 201101 2 002	III/b	01/10/2017	-	Auditor Pertama	01/01/2017	8	11	Pembentukan Auditor Ahli	2012	UNMUL Samarinda (Akuntansi)	2006	Islam
39	Hamdani, S.T Gunung Tabur Friday, October 4, 1974	19741004 199803 1 003	III/b	01/10/2017	-	Auditor Pertama	-	15	9	Pembentukan Auditor Ahli	2016	UNTAG Samarinda (Teknik Sipil)	2014	Islam
40	Achmad Suyanto, S Madiun Sunday, March 29, 1970	19700329 199803 1 006	III/b	01/04/2018	-	Fungsional Umum	-	16	9	Pra Jabatan	1998	SMA Surakarta (IPS)	1988	Islam
41	Norhasanah, S.E Tanjung Redeb Tuesday, October 4, 1983	19831004 200701 2 010	III/b	01/04/2018	-	Auditor Pertama	01/11/2018	11	1	Pembentukan Auditor Ahli	2017	STIEM Tanjung Redeb (Ekonomi Pembangunan)	2012	Islam
42	Hermansyah, S.E Tidung Pale Thursday, May 1, 1980	19800501 201001 1 027	III/b	01/10/2018	-	Fungsional Umum	-	9	11	Pembentukan Auditor Ahli	2017	STIEM Tanjung Redeb (Manajemen)	2011	Islam
43	Mariani, S.E Bujangga Monday, April 16, 1979	19790416 200701 2 000	III/b	01/04/2018	-	Fungsional Umum	-	12	11	Pra jabatan	2007	STIEM Tanjung Redeb (Ekonomi Pembangunan)	2015	Islam
44	Halid Syahrani Gunung Tabur Thursday, April 9, 1970	19700409 200212 1 006	II/d	01/04/2015	-	Fungsional Umum	-	17	0	Pra Jabatan	2003	STM Tarakan (Bangunan)	1990	Islam
45	Rakhmat Hidayat Tarakan Tuesday, June 6, 1972	19720606 200701 1 035	II/d	01/04/2019	-	Fungsional Umum	-	22	6	Pra Jabatan	2008	STM Tarakan (Bangunan)	1993	Islam
46	Aspihani Tanjung Redeb Monday, May 31, 1976	19760531 200701 1 011	II/d	01/04/2019	-	Fungsional	-	15	11	Pra Jabatan	2008	MAN Tanjung Redeb (IPS)	1998	Islam



47	Agus Hartamin Sambaling Friday, August 15, 1975	19750815 200701 1 022	II/d	01/10/2019	-	Fungsional Umum	-	21	7	Pra Jabatan	2007	SMA Tanjung Redeb (IPS)	1994	Islam
48	Wahyudin Gunung Tabur Wednesday, February 25, 1976	19760225 200801 1 017	II/c	01/04/2016	-	Fungsional	-	16	0	Pra Jabatan	2008	SMA Tarakan (IPS)	1998	Islam
49	Musaini Mataram Tuesday, May 12, 1981	19810512 200901 1 004	II/c	01/04/2017	-	Fungsional Umum	-	14	3	Pra Jabatan	2010	SMA Tanjung Redeb (IPS)	1999	Islam
50	Andang Sutandi Teluk Bayur Tuesday, December 23, 1980	19801223 200901 1 004	II/c	01/10/2017	-	Fungsional	-	16	0	Pra Jabatan	2010	SMA Tanjung Redeb (IPA)	1998	Islam
51	Iliham Wahyudi Tuesday, December 7, 1976	19761207 201001 1 011	II/c	01/04/2018	-	Fungsional Umum	-	14	11	Pra Jabatan	2011	SMEA Perdagangan	1995	Islam
52	Azizah Jufrie Tanjung Redeb Friday, September 10, 1982	19820910 201001 2 025	II/b	01/04/2014	-	Fungsional Umum	-	15	8	Pra Jabatan	2012	SMA	2002	Islam
53	Heriadi Gunung Tabur Friday, March 25, 1983	19830325 200701 1 003	II/a	01/01/2010	-	Fungsional Umum	-	18	10	Pra Jabatan	2009	MAN (IPS)	2001	Islam



Tabel.1.1

DAFTAR TENAGA KERJA KONTRAK INSPEKTORAT

NO	NAMA / TANGGAL LAHIR	NO DAN TANGGAL SK	PENDIDIK AN	JENIS KELAMIN	AGAMA	KET
1	Safri Firmansyah, SE	814.2/600/BKPP-I/17	S1 Ekonomi	Laki-laki	Islam	
2	Hendri Budi Utomo, S.IP	814.2/595/BKPP-I/17	S1	Laki-laki	Islam	
3	Pujiono	814.2/597/BKPP-I/17	SMA	Laki-laki	Islam	
4	Taufik Hidayat	814.2/598/BKPP-I/17	SLTA	Laki-laki	Islam	
5	M.Maila Alfian	814.2/599/BKPP-I/17	SLTA	Laki-laki	Islam	
6	Abdul Hamid,S.Pd.I	814.2/596/BKPP-I/17	S1	Laki-laki	Islam	
7	Hesty Saprina,SP,ME	814.1/356.2/BKPP-I/17	S2	Perempuan	Islam	
8	Anisa Indriani	814.1/3625/BKPP-1/18	SLTA	Perempuan	Islam	

1.5 Permasalahan Utama dan Isu Strategis

Permasalahan permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di Kabupaten Berau dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Lemahnya pengendalian Internal pada organisasi Pemerintah daerah.
2. Perlunya peningkatan keidisiplinan dan motivasi aparat dan perangkat Kampung.
3. Belum seluruhnya pengelola keuangan pada unit organisasi memenuhi kompetensinya.
4. Kurangnya Respon pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pimpinan satuan unit kerja.
5. Masih kurangnya SDM berbasis IT, tehnik sipil dan Akuntansi.
6. Terbatasnya Sarana dan Prasarana penunjang Pengawasan
7. Terbatasnya SDM Fungsional Auditor.



8. Terbatasnya SDM tenaga P2UPD.
9. Masih minimnya alokasi Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pengawasan / pemeriksaan / pembinaan ke Perangkat Daerah dari Kabupaten hingga ke wilayah Kampung serta anggaran untuk peningkatan Kapabilitas Aparatur pengawas masih sangat terbatas.







BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam rangka mengemban tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Berau, diperlukan perencanaan yang baik dengan didukung oleh aparat pengawas yang profesional, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme guna memberikan pelayanan yang prima. Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Berau tahun 2016 s.d 2021, visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

2.1.1 Visi Inspektorat Kabupaten Berau

Berdasarkan visi Kabupaten, Inspektorat Kabupaten Berau menetapkan visinya sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG
BERSIH DAN BAIK (CLEAN AND GOOD GOVERNANCE) MELALUI
PENGAWASAN YANG OPTIMAL”**

Misi Inspektorat Kabupaten Berau

Untuk mewujudkan visi Inspektorat Kabupaten Berau dipandang perlu menetapkan 4 (empat) misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Berau yaitu sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kampung;

Misi ini dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya Inspektorat harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam menyelenggarakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kampung. Pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, setiap layanan kepada masyarakat.



2. Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam Pengambilan Kebijakan;

Misi ini dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya Inspektorat dapat memberikan jaminan kualitas pengawasan dalam pengambilan kebijakan, dan meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi tantangan perubahan dimasa yang akan datang.

3. Mendorong Terwujudnya Aparatur yang Bersih dan Handal;

Misi ini dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya Inspektorat dapat meningkatkan pelayanan pengawasannya sehingga program / kegiatan pemerintah dan kampung yang dilaksanakan serta diawasi oleh aparatur yang bersih dan handal.

4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengawasan.

Misi ini dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya Inspektorat dapat memberikan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, dan transparan di pandang perlu meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengawasan, dalam mempertahankan dan meningkatkan kemampuan pengawasan.

2.1.2 Tujuan Dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja. Adapun tujuan & sasaran Inspektorat Kab. Berau untuk periode 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik pada jajaran pemerintah Kabupaten Berau merupakan tujuan, dari misi inspektorat Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelaksanaan urusan pemerintahan kampung, serta Meningkatkan kualitas pengawasan



dalam pengambilan kebijakan, dengan sasaran Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi.

2. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik pada jajaran pemerintah Kabupaten Berau merupakan tujuan, dari misi inspektorat dalam Mendorong terwujudnya aparatur yang bersih dan handal serta Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawasan. sebagai upaya dengan sasaran Menurunnya temuan audit kinerja SKPD dibawah target.

2.1.3 Kebijakan, Strategi , Arah Kebijakan dan Program

Proses perencanaan strategik merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran, maka Inspektorat Kabupaten Berau menetapkan 3 (tiga) strategi dan 6 (enam) Kebijakan sebagai berikut :

1. Strategi

1. Pengembangan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko;
2. Peningkatan kapasitas pemeriksa;
3. Pelaksanaan pemeriksaan yang berkualitas.

2. Kebijakan

1. Perbaikan norma, standar, dan prosedur pemeriksaan;
2. Pelaksanaan SPIP oleh PD;
3. Memanfaatkan/ pengembangan sistem informasi manajemen Pemeriksaan pada Inspektorat;
4. Peningkatan kualitas pelaporan OBRİK sesuai SAP;
5. Peningkatan Penetapan Audit/ Pemeriksaan untuk kegiatan strategis.
6. Rekruting dan diklat fungsional/ Teknis Auditor/ Pemeriksa sesuai OBRİK;



3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu yang ditetapkan dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 2.1
Arah Kebijakan Inspektorat Kabupaten Berau

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Pengembangan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko;	Perbaikan norma, standar, dan prosedur pemeriksaan;
	Pelaksanaan SPIP oleh PD;
Pelaksanaan pemeriksaan yang berkualitas.	Memfaatkan/ pengembangan sistem informasi manajemen Pemeriksaan pada Inspektorat;
	Peningkatan kualitas pelaporan OBRİK sesuai SAP;
	Peningkatan Penetapan Audit/ Pemeriksaan untuk kegiatan strategis.
Peningkatan kapasitas pemeriksa;	Rekruting dan diklat fungsional/ Teknis Auditor/ Pemeriksa sesuai OBRİK;

4. Program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Berau menetapkan cara mencapai tujuan dan sasaran melalui kebijakan dan program yang hendak dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Penyusunan kegiatan tahun anggaran 2019 adalah penjabaran dari pada program Inspektorat Kabupaten Berau yaitu: Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan program kegiatan, Inspektorat Kabupaten Berau menetapkan 7 (tujuh) program dan 38 (tiga puluh delapan) Kegiatan dalam Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :



1. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

- 1.1 Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala
- 1.2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
- 1.3 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
- 1.4 Inventarisasi temuan pengawasan
- 1.5 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
- 1.6 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
- 1.7 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
- 1.8 Pembinaan, Identifikasi dan Penilaian Risiko Perangkat Daerah
- 1.9 Pemberian/Pelayanan Jasa Advice Pengawasan

2. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

- 2.1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- 2.2 Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
- 2.3 Pengembangan Wawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah
- 2.4 Sosialisasi, Peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- 3.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 3.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
- 3.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 3.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 3.6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 3.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 3.8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 3.9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 3.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 3.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 3.13 Penyediaan Makanan dan Minuman



- 3.14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 3.15 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
- 3.16 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- 4.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
- 4.2 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor.
- 4.3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
- 4.4 Pengadaan Teknologi Informasi Pengawasan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- 5.1 Sosialisasi Kinerja Program SKPD.
- 5.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD.

6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- 6.1 Pengadaan Pakaian Batik Beserta Kelengkapannya

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

- 7.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal.
- 7.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Pada tahun anggaran 2019 Inspektorat Daerah Kabupaten Berau telah membuat Rencana Kinerja Tahunan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja Utama serta target yang akan dicapai sebagai berikut :

A. Sasaran Strategis

- 1. Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;
- 2. Menurunnya temuan audit kinerja OPD di bawah target.;

B. Indikator Kinerja Utama

- 1. Jumlah temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;
- 2. Jumlah OPD dengan kinerja di bawah target.

Guna penyempurnaan dalam Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan adanya Revisi Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021 yang mengacu pada Tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021 maka Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan dilakukan Review / Revisi IKU 2017-2021. Oleh karenanya kebijakan yang perlu dilakukan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilannya Perjanjian Kinerja digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sudah



dilakukan Review. yang diambil sebagai Indikator Kinerja Utama adalah yang ditetapkan sebagai Sasaran Startegis dan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Berau sebagai dasar evaluasi kinerja, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja Inspektorat Kabupaten Berau yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Riview Indikator Kinerja Utama

Riview Indikator Kinerja Utama

Inspektorat Kabupaten Berau yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RJMD

TAHUN 2017-2021

Tujuan ke 6 RPJMD

Mewujudkan pemerintah yang bersih, transparan, profesional & akuntabel

Sasaran 17 RPJMD

Terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi

No.	INDIKATOR KINERJA SASARAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (TH.2016)	Target Kinerja Program PERTAHUN					kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	Temuan	15	13	13	10	10	10	10
2	Jumlah OPD dengan kinerja di bawah target.	opd	15	13	13	10	10	10	10



2.3 Rencana Kerja Tahunan

Pada Inspektorat terdapat rencana kerja tahunan yang terdiri dari 7 Program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan yang terdiri dari sebagai berikut :

Tabel 2.3
RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN 2019

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN				KET			
URAIAN	INDIKATOR	Rencana Tingkat capaian (Target)			URAIAN	INDIKATOR	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)				
		Satuan	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	Jumlah temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	temuan	10	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	01	Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala	Input	Tersedianya dana	Rp.	2.230.000.000,-	
								Out Put	Jumlah Pengawasan internal secara berkala (Obrik yang diperiksa)	Obrik	60	
								Out Come	Pemeriksaan reguler, Reviw Keuangan dan Evaluasi LAKIP	%	100	
						02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintahan daerah	Input	Tersedianya dana	Rp.	845.000.000,-	
								Out Put	Jumlah kasus pengaduan yang ditangani	kasus / laporan	40	
								Out Come	Persentase Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah kasus yang diperiksa	%	100	
					04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawah	Input	Tersedianya dana	Rp.	1.195.000.000,-		
							Out Put	Jumlah kampung ditangani penanganan kasus	kampung	100		



						nya	Out Come	Pemeriksaan kasus diwilayah Kecamatan / Kampung	%	86	
						05	Input	Tersedianya dana	Rp.	192.000.000,-	
							Out Put	Jumlah bulan Laporan Inventarisasi temuan pengawasan	bulan	4	
							Out Come	Tersedianya rekap Data Hasil Temuan Pemeriksaan Reguler dan Khusus serta Data LP2P	%	100	
						06	Input	Tersedianya dana	Rp.	274.000.000,-	
							Out Put	Jumlah bulan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	bulan	13	
							Out Come	Hasil Temuan Pengawasan yang ditindak lanjuti	%	100	
						07	Input	Tersedianya dana	Rp.	480.000.000,-	
							Out Put	Jumlah Koordinasi pengawasan dan saber pungi	kali	24	
							Out Come	Terawasinya Kasus kasus penyimpangan termasuk Pungutan liar	%	100	
						08	Input	Tersedianya dana	Rp.	65.000.000,-	
							Out Put	Jumlah temuan yang dievaluasi	temuan	1	
							Out Come	Terevaluasinya temuan hasil pengawasan	%	100	
						09	Input	Tersedianya dana	Rp.	50.000.000,-	
							Out Put	Jumlah temuan yang	temuan	1	



						Out Come	Tercapainya rapat koordinasi Inspektorat ke Luar Daerah	%	100	
					19	Input	Tersedianya dana	Rp.	70.000.000,-	
						Out Put	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	OT	47	
						Out Come	Rapat rapat koordinasi dalam daerah	%	100	
					20	Input	Tersedianya dana	Rp.	291.400.000,-	
						Out Put	Jumlah tenaga administrasi / teknis perkantoran	Orang	9	
						Out Come	Terpenuhinya tenaga admnistrasi perkantoran	%	100	
					5	Input	Tersedianya dana	Rp.	451.942.000,-	
						Out Put	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Unit	1	
						Out Come	Pemeliharaan bangunan gedung Kantor Inspektorat	%	80%	
					22	Input	Tersedianya dana	Rp.	15.000.000,-	
						Out Put	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Kali	1	
						Out Come	Pemeliharaan bangunan gedung Kantor Inspektorat	%	75%	
					26	Input	Tersedianya dana	Rp.	8.000.000,-	
			02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur						



					03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	rutin/berkala perengkapan gedung kantor	Out Put	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jenis	5		
								Out Come	Pemeliharaan bangunan gedung Kantor Inspektorat	%	100		
							4 5	Pengadaan Teknologi Informasi Pengawasan	Input	Tersedianya dana	-	-	
									Out Put	Jumlah Teknologi Informasi pengawasan	-	-	
									Out Come	Terpenuhinya Kebutuhan akan digitalisasi	-	-	
							6	Pengadaan Pakaian Batik	Input	Tersedianya dana	Rp.	36.000.000,-	
					Out Put	Jumlah pakaian batik dan perlengkapannya			Stell	60			
					Out Come	Terpenuhinya Kebutuhan akan pakaian batik dan perlengkapannya			%	100			
					21	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input	Tersedianya dana	-	-	
									Out Put	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	
								Out Come	Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti Pelatihan Formal	-	-		
							2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Input	Tersedianya dana	-	-	
Out Put	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-										



							Out Come	Tenaga Pemeriksa dan aparat pengawasan yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	
							Input	Tersedianya dana	Rp.	20.000.000,-	
						5	Out Put	Jumlah sosialisasi kinerja program SKPD melalui pameran yang diikuti	Kali	1	
							Out Come	Persentase sosialisasi kinerja program SKPD melalui pameran yang diikuti	%	100	
							Input	Tersedianya dana	Rp.	17.500.000,-	
						9	Out Put	Jumlah Dokumen perencanaan laporan capaian kinerja SKPD	Dokumen	5	
							Out Come	Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	%	85.5	
							JUMLAH		Rp.	9.720.000.000,-	

2.4. Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparansi dan Akuntabel berorientasi pada hasil maka perlu ditetapkan dengan perjanjian Kinerja antara Bupati Berau dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau sebagai dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja sebagai tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Berau.



Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji. Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di Lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019; yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 60 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019 kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 18 Tahun 2019 Tanggal 10 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 60 Tahun 2018 Tanggal 10 September 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Inspektorat Kabupaten Berau telah didukung beberapa program dan kegiatan yang selanjutnya dibuat Penetapan Kinerja melalui Perjanjian Kinerja pada tahun anggaran 2019 dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta Target yang akan dicapai sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	Jumlah temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi.	10 temuan
2	Menurunnya temuan audit kinerja OPD di bawah target	Jumlah OPD dengan kinerja di bawah target	10 opd



Tabel 2.5

Sasaran Strategis, Program dan Anggaran Tahun 2019

No	Sasaran Strategis , Program	Anggaran
	Sasaran I : Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi; didukung dengan Program :	
1	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	5.366.000.000
	Sasaran II : Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi; didukung dengan Program :	
2	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	1.688.520.000
3	Program Pelayanan administrasi perkantoran	2.117.038.000
4	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	474.942.000
5	Program Peningkatan disiplin aparatur	36.000.000
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0
7	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	37.500.000



**BAB III****AKUNTABILITAS KINERJA****3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya****Tabel 3.1****Rekomendasi Inspektorat Kab.Berau Tahun Sebelumnya**

NO	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Membuat Reward dan Punishment untuk seluruh jabatan setingkat eselon IV keatas yang sebanding (terkait) dengan hasil pengukuran (capaian) kinerjanya.	Telah melakukan reward sesuai dengan ketentuan
2.	Menyajikan laporan tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya efisiensi tersebut dapat dikuantifikasikan.	Telah dilakukan dengan membuat laporan yang terkuantifikasikan.
3.	Memenuhi realisasi kinerja dalam laporan kinerja.	Telah ditindaklanjuti.
4.	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata yang disajikan pada dokumen pelengkap atas rencana aksi.	Telah ditindaklanjuti dengan membuat laporan Progres Rencana Aksi.
5.	Meningkatkan informasi capaian output di tahun depan.	Telah ditindaklanjuti dengan capaian output sesuai target.
6.	Meningkatkan realisasi capaian kinerja yang dilaporkan (outcome) untuk pencapaian target tahun berjalan melebihi capaian tahun sebelumnya.	Telah ditindaklanjuti dengan meningkatnya capaian dari tahun sebelumnya.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.



Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kriteria Skala Nilai Serapan Kinerja

No.	Interval Nilai Serapan	Kriteria
1.	82 - 100	Sangat berhasil
2.	64 - 81	Tinggi/ Berhasil
3.	46 - 63	Cukup Berhasil
4.	28 - 45	Rendah
5.	0 - 27	Sangat Rendah

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dengan menggunakan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis/ Penetapan Kinerja.

Dengan pengukuran kinerja ini kita dapat membandingkan capaian kinerja kita tahun ini dengan tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi untuk langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam melaksanakan program-program kita selanjutnya. Untuk itu Inspektorat kabupaten Berau melakukan beberapa hal :

- 1) Mengusulkan penambahan pegawai khususnya pejabat fungsional auditor maupun fungsional petugas pengawas urusan pemerintah daerah.
- 2) Merumuskan ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan.
- 3) Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif, seefisien, dan seekonomis mungkin dalam rangka peningkatan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana.



- 4) Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan maupun kebijakan.
- 5) Agar SDM Inspektorat Kabupaten Berau menjadi Aparatur yang handal, terampil serta kreatif perlu disediakan dana untuk mengikuti diklat teknis sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- 6) Untuk menunjang kelancaran pekerjaan perlu ditambah sarana komputer PC maupun Laptop serta printer yang memadai.
- 7) Kendaraan Operasional Roda 4 juga perlu ada penambahan guna kelancaran dalam peningkatan kinerja.

Dengan peningkatan pengawasan / pemeriksaan yang sasarannya adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta peningkatan kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah, diharapkan dapat menekan sekecil mungkin terjadinya hambatan pelaksanaan Tupoksi, hambatan pelaksanaan kegiatan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan daerah dan sejenisnya yang pada akhirnya akan menurunkan citra Pemerintah Daerah dimata masyarakat. Pelaksanaan pengawasan / pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Berau sebagaimana Tupoksi yang diamanatkan, diharapkan memberikan sumbangan yang berarti dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kabupaten Berau.

3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program pada tahun 2019 adalah sebanyak 2 (dua) sasaran. Capaian sasaran diukur berdasarkan Indikator kinerja yang telah ditetapkan Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 antara Bupati Berau dengan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Berau pada tahun 2019. Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian kinerja mutlak dan wajib dilaksanakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan Inspektorat yang akan datang. Evaluasi & analisis capaian kinerja dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

- 1) Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.
- 2) Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.



- 3) Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis organisasi.
- 4) Membandingkan realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar Nasional.
- 5) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.
- 6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya.
- 7) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian Kinerja yang disertai evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja masing-masing sasaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Berau sebagai berikut :

Sasaran I : Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;

Indikator keberhasilan dan capaian Kinerja sasaran Menurunnya Temuan yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2016-2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	% pencapaian target 2019 = (Klm 3-(4-3)/3x100)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Menurunnya temuan yang	1. Jumlah temuan yang berindika	13 temuan	0 temuan	100 %	8 temuan	7 temuan	3 temuan



berindikasi tindak pidana korupsi;	si tindak pidana korupsi						
% pencapaian sasaran Menurunnya Temuan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi ;			100 %				
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 untuk mendukung pencapaian sasaran 1		5.366.000.000,-					
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019 untuk mendukung pencapaian sasaran 1		4.795.630.000,- (89,37 %)					

Berdasarkan Tabel 3.2 tersebut maka dari 1 indikator yang ditetapkan Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut :

1. Temuan yang terindikasi tindak pidana Korupsi

Temuan yang terindikasi Tindak pidana korupsi adalah salah satu alat untuk mengukur keberhasilan kinerja Inspektorat sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 yang merupakan komponen penting dalam rangka penurunan Temuan yang berindikasi tindak pidana Korupsi di Kabupaten Berau.

Harapan Nasional menurunnya temuan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2019 dari tahun ke tahun diharapkan semakin menurun. Kalimantan Timur mempunyai harapan yang sama yaitu diharapkan dari tahun ke tahun dapat mengalami penurunan jumlah temuan yang berindikasi tindak pidana Korupsi, data Riil capaian Nasional dan Propinsi Tahun 2018 belum kami peroleh. Untuk Kabupaten Berau pada tahun 2016 lalu yaitu 8 temuan yang terindikasi tindak pidana korupsi turun pada tahun 2017 menjadi 7 temuan ditahun 2018 turun menjadi 3 temuan dan 2019 menjadi 0 temuan yang terindikasi tindak pidana korupsi di Kabupaten Berau dengan persentase



pencapaian sasaran sebesar 100 %.

Kondisi yang dicapai:

Pada tabel dibawah memperlihatkan bahwa pada tahun 2019, dari indikator kinerja “Jumlah Temuan yang berindikasi tindak pidana Korupsi ” didapat capaian realisasi 0 Temuan dari target 10 temuan atau dengan persentase pencapaian sasaran target sebesar 100 %. Data ini **menunjukkan adanya pencapaian yang cukup memuaskan terhadap penurunan jumlah temuan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi.**

Tabel 3.4
Target dan Capaian Realisasi Indikator Jumlah Temuan yang beridikasi Tindak Pidana Korupsi

Indikator Kinerja	Target 2019	Capaian Realisasi 2019
<i>Jumlah Temuan yang beridikasi Tindak Pidana Korupsi</i>	10 temuan	0 temuan (100%)

Dalam upaya peningkatan Penurunan Temuan yang terindikasi tindak pidana korupsi tersebut, pada tahun 2019 Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat telah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu:

- 1) Melaksanakan Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah, Lembaga Dinas, Kantor, Badan, Sekretariat, Kecamatan, Kelurahan dan Kampung
- 2). Untuk menurunkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi tersebut Inspektorat Kabupaten Berau telah menetapkan jadwal pemeriksaan dan pembinaan secara komprehensif yang tertuang dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2019 dengan jumlah obyek pemeriksaan/ pembinaan yang diaudit sebanyak 60 obrik sesuai dengan PKPT 2018 yang terdiri dari 5 Badan, 24 Dinas, Sekretariat 3, Kecamatan 13, Kelurahan 10, dan



Tambahan obrik (Kesbang, BPBD, KPU, Kantor Penghubung, Sekretraiat KORPRI). Selanjutnya Pemeriksaan pada 100 Kampung dan 40 pemeriksaan khusus/kasus Pengaduan, serta Review Laporan Keuangan Pemda/ SKPD (pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta semua Dinas, Badan, Sekretariat dan Kantor Pemerintah Kabupaten Berau), Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (pada Pemerintah Kabupaten Berau, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sistem AKIP) dan pencapaian kinerja organisasi (Evaluasi Lakip semua Dinas, Badan, Sekretariat dan Kantor Pemerintah Kabupaten Berau), Bantuan Propinsi yang bersifat spesifik (Bosda Propinsi, Tambahan Penghasilan Guru dan Tutor Paud dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Wilayah Kabupaten Berau - (80 Sekolah penerima BOSDA).

3). Sasaran menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dilakukan melalui:

- Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, ini merupakan bagian dari kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (ditargetkan 60 obrik).
- Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditargetkan (40 kasus).
- Pemeriksaan Khusus Pemerintah Dibawahnya yang ditargetkan (100 Kp)

Kegiatan pengawasan / audit dan review Laporan Keuangan ini dengan indikator kinerja yaitu : Input, yaitu berupa dana Kegiatan:

- Pengawasan Internal secara berkala sebesar Rp. 2.230.000.000,-
- Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah Rp. 845.000.000,-
- Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya sebesar Rp. 1.195.000.000,-
- Inventarisasi temuan pengawasan Rp. 192.000.000,-
- Tindak lanjut hasil temuan pengawasan sebesar Rp. 274.000.000,-



- Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif termasuk saber pungli sebesar Rp. 480.000.000,-
 - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan sebesar Rp. 65.000.000,-
 - Pembinaan, identifikasi risiko perangkat daerah Rp. 50.000.000,-
 - Pemberian/Pelayanan Jasa Advice Pengawasan Rp.35.000.000,-
- Sehingga total dana Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH untuk pencapaian sasaran 1 Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi sebesar Rp. 5.366.000.000,- sedangkan sumber daya sebanyak 25 orang auditor, 4 orang P2UPD dan 22 orang fungsional umum yang tergabung dalam Tim.

Output, laporan hasil pengawasan dan Review Keuangan Pemerintah dan SKPD Kabupaten Berau sebanyak 311 laporan,

Outcome,

perangkat daerah yang telah menindaklanjuti hasil temuan dan review laporan keuangan adalah sebanyak 36 Temuan dari jumlah temuan Hasil Pemeriksaan Reguler sebanyak 287 Temuan atau Persentase Pemeriksaan dengan Temuan yang ditindaklanjuti sebesar 12,54 %.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Untuk mencapai Visi dan misi Pembangunan Kabupaten Berau lima tahun kedepan ditetapkan Renstra Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 Di dalam Tahun 2019 untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan ditetapkan APBD Kabupaten Berau Tahun 2019 sebesar Rp. 17.851.325.000,- dengan Realisasi Keuangan secara keseluruhan 90,95 % Alokasi dan Realisasi anggaran tersebut terdiri dari : Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.131.325.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 7.028.548.633,-(86,44 %) dan realisasi pencapaian fisik kegiatan belanja langsung sebesar 100% Belanja Langsung sebesar Rp. 9.720.000.000,- realisasi capaian target kinerja keuangan Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2019 dari Belanja Langsung Rp. 8.840.566.052,- (90,95 %) sedangkan



realisasi fisik kegiatan mencapai 99,60 %. Berikut realisasi belanja pada Januari hingga akhir Desember 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Belanja tidak langsung - TA 2019
Inspektoraat Kabupaten Berau
PER 31 DESEMBER 2019

TAHUN	Belanja Langsung	Anggaran	Realisasi		Sisa
		(Rp.)	(Rp.)	%	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
2018	Belanja Pegawai	6.528.700.000,00	5.968.761.677,00	91,42	559.938.323,00
2019	Belanja Pegawai	8.131.325.000,00	7.028.548.633,00	86,44	1.102.776.367,00

Ket. Sumber data Sub Bag Keuangan dan Aset

Tabel 3.6
Realisasi Belanja Langsung - TA 2019
Inspektoraat Kabupaten Berau
KONDISI S/D BULAN DESEMBER 2019

No	Sasaran Strategis	Belanja Langsung	Alokasi		Realisasi Fisik Keg		Realisasi Keuangan		Silpa	
			Target/ Volume	Anggaran (Rp)	Target/ Volume	% Keg	(RP)	% Keu	(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	256	5,366,000,000	237	93,24	4,795,630,513	89,37	570,369,487
		01	Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala	60	2,230,000,000	60	100.00	2,161,169,847	96.91	68,830,153
		02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	40	845,000,000	29	72.50	776,416,400	91.88	68,583,600
		04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	100	1,195,000,000	100	100.00	1,033,695,000	86.50	161,305,000
		05	Inventarisasi temuan pengawasan	4	192,000,000	4	100.00	186,678,593	97.23	5,321,407
		06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	12	274,000,000	12	100.00	201,188,009	73.43	72,811,991
		07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	24	480,000,000	16	66.67	311,548,756	64.91	168,451,244
		08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	2	65,000,000	2	100.00	57,328,908	88.20	7,671,092
		09	Pembinaan, Identifikasi dan penilaian resiko perangkat daerah	12	50,000,000	12	100.00	32,900,000	65.80	17,100,000
		10	Pemberian/Pelayanan Jasa Advice Pengawasan	2	35,000,000	2	100.00	34,705,000	99.16	295,000
2	Menurunnya temuan audit kinerja	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,922	2,117,038,000	2902	97	1,847,041,898	91,97	170,011,651



Inspektorat Kabupaten Berau

OPD di bawah target	01	Penyediaan jasa surat menyurat	583	5,580,000	583	100.00	5,023,500	90.03	556,500
	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	198,600,000	12	100.00	146,665,299	75.85	51,934,701
	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	31	360,000,000	31	100.00	332,020,324	92.23	27,979,676
	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	23	129,808,000	23	100.00	114,682,000	88.35	15,126,000
	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1,438	5,330,000	1438	100.00	5,330,000	100.00	-
	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5	25,000,000	5	100.00	24,724,000	98.90	276,000
	10	Penyediaan alat tulis kantor	20	83,000,000	20	100.00	83,000,000	100.00	-
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	70	15,000,000	52	74.29	14,991,500	99.94	8,500
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	5	3,000,000	5	100.00	3,000,000	100.00	-
	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5	451,361,000	5	100.00	416,493,470	92.29	34,867,530
	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	9	6,500,000	8	88.89	5,467,000	84.11	1,033,000
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	600	3,000,000	600	100.00	3,000,000	100.00	-
	17	Penyediaan makanan dan minuman	37	69,459,000	37	100.00	69,458,400	100.00	600
	18	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	28	400,000,000	28	100.00	399,184,576	99.80	815,424
	19	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	47	70,000,000	47	100.00	70,000,000	100.00	-
	20	Penyediaan jasa Tenaga administrasi / teknis perkantoran	9	291,400,000	8	88.89	253,986,280	87.16	37,413,720
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7	474,942,000	7	100.00	462,528,000	97,38	12,459,000
	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	451,942,000	1	100.00	439,942,000	97.34	12,000,000
	22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1	15,000,000	1	100.00	14,694,500	97.96	350,500
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5	8,000,000	5	100.00	7,891,500	98.64	108,500
	45	Pengadaan Teknologi Informasi Pengawasan	-	-	-	-	-	-	-
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	60	36,000,000	59	98,33	35,400,000	98.33	600,000
	06	Pengadaan Pakaian batik beserta perlengkapannya	60	36,000,000	59	98.33	35,400,000	98.33	600,000
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	-	-	-
	01	Pendidikan dan pelatihan formal	-	-	-	-	-	-	-
	02	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	-	-	-	-	-	-	-



06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6	37,500,000	6	100.00	35,044,821	93,45	2,455,179
05	Penyusunan Dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	5	17,500,000	5	100.00	15,044,821	85.97	2,455,179
09	Sosialisasi kinerja program SKPD	1	20,000,000	1	100.00	20,000,000	100.00	-
21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	74	1,688,520,000	90	107,74	1,153,104,257	92,68	123,538,631
01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	21	1,047,900,000	40	190.48	1,043,186,172	99.55	4,713,828
03	Pelatihan teknis pengawasan	21	162,780,000	19	90.48	109,918,085	67.53	52,861,915
04	Pengembangan wawasan aparat pengawas internal pemerintah daerah	30	277,840,000	30	100.00	273,858,902	98.57	3,981,098
05	Sosialisasi, peningkatan maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP	2	200,000,000	1	50.00	138,081,210	69.01	61,981,790
TOTAL		3,325	9,720,000,000	3,301	99,60	8,328,749,489	90,95	879,433,948

Untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis yang telah ditetapkan maka Inspektorat Kabupaten Berau telah dialokasikan Anggaran baik Belanja Tidak Langsung maupun belanja Langsung sebagaimana yang telah dikemukakan diatas .

Alokasi Belanja Langsung yang terfokus untuk menunjang Tercapainya pelaksanaan Sasaran Strategis terdiri dari 7 Program meliputi :

Untuk Pencapaian Sasaran I : Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi didukung oleh Program :

1. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan dana sebesar Rp. **5.366.000.000**

Untuk mendukung Pencapaian Sasaran II : Menurunnya temuan audit kinerja OPD di bawah target. Didukung oleh Program :

1. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan dana sebesar Rp. 1.688.520.000,-
2. Program Pelayanan administrasi perkantoran dengan dana sebesar Rp. 2.117.038.000,-



3. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan dana sebesar Rp. 474.942.000,-
4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan dana sebesar Rp. 37.500.000

Analisis Target Capaian Kinerja Keuangan Inspektorat Kabupaten Berau :

Berdasarkan Kebijakan Keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019 dan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019, Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Daerah pada OPD Inspektorat Kabupaten Berau adalah sebesar Rp. 15.869.114.685 (88,90 %) yang terdiri dari target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.8.131.325.000 dan target Belanja Langsung sebesar Rp.9.720.000.000 Untuk Belanja Tidak Langsung terealisasi Rp.7.028.548.633,- (87,18 %) sedangkan Belanja Langsung teralisasi Rp.8.840.566.052 (86,44 %)

Realisasi pencapaian kinerja keuangan belanja langsung sebesar 90,95 %, secara umum Program dan Kegiatan APBD pada Inspektorat Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019 sudah bisa terlaksana dengan realisasi fisiknya sebesar 99,60 %. Jika dibandingkan dengan realisasi Pencapaian Kinerja Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2018 sebesar 87,18 %, pada Tahun Anggaran 2019 terjadi peningkatan sebesar (3,77 %). Peningkatan terjadi karena pengaruh program kegiatan yang dapat terlaksana secara keseluruhan walaupun ada kegiatan yang pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan akan tetapi dapat terlaksana sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan realisasi fisik tahun anggaran 2019. Secara keseluruhan realisasi pencapaian kinerja tahun anggaran 2019 dapat terselenggara dengan baik.

Berdasarkan atas Program Kegiatan dan pencapaian sasaran / kegiatan secara umum Laporan Inspektorat Kabupaten Berau telah berhasil mencapai sasarannya. Adapun faktor-faktor utama penyebab keberhasilan adalah :

1. Adanya komitmen pimpinan, dalam hal ini adalah Kepala Daerah yang sangat mendukung fungsi pengawasan dalam birokrasi Pemerintahan Daerah, dimana disiapkan dana yang memadai sehingga pelaksanaan tugas pemeriksaan dapat berjalan lebih lancar.



2. Terjalannya hubungan koordinasi yang mantap dan harmonis dengan para pimpinan unit kerja, yang memberikan dukungan yang memadai terhadap pentingnya fungsi pengawasan dalam unit organisasi yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan / umpan balik untuk perbaikan perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan sehingga dapat ditindak lanjuti tepat waktu.

Permasalahan dan kendala lain yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan Kinerja Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2019 adalah :

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun Anggaran 2019 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti sehingga menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Inspektorat Kabupaten Berau. Meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Berau dalam menjalankan pelaksanaan program dan kegiatannya antara lain :

- 1). Terbatasnya Sumber daya Manusia (SDM)

Kekuatan Personil atau Sumber daya Manusia (SDM), baik dalam jumlah maupun kualitas masih terbatas. Kemampuan kompetensi yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dimana untuk Inspektorat Kabupaten Berau saat ini memiliki aparatur berjumlah 52 Orang ASN dan 8 Orang PTT dengan total aparatur 60 Orang dari yang seharusnya 118 Orang

- a. Belum seimbang rasio antara tenaga auditor/pengawas dengan obyek pemeriksaan dimana auditor berjumlah 25 (dua puluh lima) dari yang seharusnya berjumlah 44 (empat puluh empat) sehingga masih kurang 19 orang. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang hanya berjumlah 4 (Empat) orang dari yang seharusnya 45 (empat puluh lima) orang dan masih dibutuhkan 41 (empat puluh satu) orang lagi. Secara keseluruhan tenaga auditor/pengawas masih kurang 60 (enam puluh) orang lagi. Diutamakan sarjana IT, arsitek, akuntansi, pertanian, dan pemetaan tanah.



- b. Untuk Sekretariat yang ada sekarang berjumlah 22 Orang dari yang seharusnya ada 30 (tiga puluh) orang, terutama yang dibutuhkan tenaga sarjana IT.
- c. Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi khusus pengawasan urusan Pemerintahan Daerah dari Instansi Pembina (Depdagri).

2). Sarana dan Prasarana masih kurang

Sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kelancaran tugas pokok. Kondisi sarana penunjang pengawasan yang dimiliki oleh Inspektorat saat ini relatif masih terbatas. Peralatan untuk pengujian pekerjaan fisik konstruksi misalnya belum ada, Kendaraan operasional pengawasan masih terbatas dimana tenaga untuk kendaraan roda 4 (empat) perlu 4 (empat) kendaraan sarana penunjang kantor seperti komputer PC masih kurang 7 (tujuh) buah, laptop dan printer masih kurang 10 (sepuluh), 5 (lima) buah alat ukur.

3). Biaya operasional Pengawasan belum terpenuhi sesuai standar

Belum terpenuhinya anggaran penunjang pengawasan sesuai kebutuhan yang dikaitkan dengan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Didalam mengantisipasi dan meminimalkan kendala dan permasalahan yang dihadapi, maka strategi pemecahan yang digunakan dimasa mendatang adalah dengan mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi pada program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Berau beberapa point yang dijabarkan berikut dapat memberi solusi :

- 1) Mengusulkan penambahan pegawai khususnya pejabat fungsional auditor maupun fungsional petugas pengawas urusan pemerintah daerah.
- 2) Merumuskan ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan.
- 3) Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana.



- 4) Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan maupun kebijakan.
- 5) Agar SDM Inspektorat Kabupaten Berau menjadi Aparatur yang handal, terampil serta kreatif perlu disediakan dana untuk mengikuti diklat teknis sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- 6) Untuk menunjang kelancaran pekerjaan perlu ditambah sarana computer PC maupun Laptop yang memadai.
- 7) Kendaraan Operasional Roda 4 juga perlu ada penambahan guna kelancaran dalam peningkatan kinerja.

Dengan peningkatan pengawasan / pemeriksaan yang sasarannya adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta peningkatan kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah, diharapkan dapat menekan sekecil mungkin terjadinya hambatan pelaksanaan Tupoksi, hambatan pelaksanaan kegiatan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan daerah dan sejenisnya yang pada akhirnya akan menurunkan citra Pemerintah Daerah dimata masyarakat. Pelaksanaan pengawasan / pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Berau sebagaimana Tupoksi yang diamanatkan, diharapkan memberikan sumbangan yang berarti dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kabupaten Berau.

3.3.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi kinerja tahun ini (Sasaran 1)

Tabel 3.7
Sasaran 1 Strategis

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Ket
Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi	Jumlah temuan yang berindikasi tindak pidana	Temuan	10	0	



	korupsi				
--	---------	--	--	--	--

Realisasi dana program Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH untuk pencapaian sasaran 1 Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi sebesar Rp 4.795.630.513,- atau sebesar 89,37% dari anggaran sebesar Rp 5.366.000.000,- dan realisasi fisik mencapai 93,24%.

3.3.2 Membandingkan Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun Terakhir (Sasaran 1) :

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Ket
1	Jumlah temuan yang terindikasi tindak pidana korupsi	Temuan	8	7	3	0	

3.3.3 Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Sasaran 1) :

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Sasaran 1

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Target jangka menengah dokumen perencanaan strategis organisasi	Selisih	Ket



1	Jumlah temuan yang terindikasi tindak pidana korupsi	Temuan	0	10 temuan	10	
---	--	--------	---	-----------	----	--

3.3.4. Membandingkan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar Nasional (Sasaran 1)

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional Sasaran 1

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Standar Nasional	Selisih	Ket
1	Jumlah temuan yang terindikasi tindak pidana korupsi	Temuan	0	-	-	Blm diperoleh data nas

3.3.5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan :

a. Faktor-faktor secara umum yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- 1) Adanya komitmen pimpinan untuk memperkuat dan mengedepankan peran Inspektorat Kabupaten Berau sebagai penjamin kualitas, konsultan bagi tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.
- 2) Adanya Komitmen OPD untuk memperbaiki dan menyempurnakan Dokumen Perencanaan / Kinerja.
- 3) Adanya kerja sama yang baik antara Inspektorat Kabupaten Berau dengan Instansi terkait di bidang Pengawasan.

b. Kendala-kendala yang menghambat pencapaian rencana kinerja ini adalah :



- 1) Masih adanya Perangkat Daerah yang belum menindaklanjuti rekomendasi / hasil Review / audit kinerja terhadap dokumen perencanaan/kinerja pada waktu yang telah ditentukan.
- 2) Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh perangkat daerah masih ada yang belum sesuai dengan rekomendasi yang diharapkan.
- 3) Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut belum dilakukan secara optimal, hal ini juga disebabkan karena keterbatasan SDM serta sarana dan prasarana.

c. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala – kendala yang merupakan penghambat dalam pencapaian rencana kinerja antara lain :

- 1) Koordinasi dengan obrik Perangkat Daerah agar temuan – temuan / rekomendasi yang belum ditindaklanjuti segera ditindaklanjuti dan tindak lanjut yang tidak sesuai agar disesuaikan dengan rekomendasi.
- 2) Orientasi dan peningkatan kualitas teknis pengawasan.
- 3) Pemutahiran Data hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
- 4) Perlu dilakukan penekanan pada saat pengawasan kepada OPD bahwa Inspektorat fungsinya melakukan pembinaan, konsultasi dan penjaminan kualitas.
- 5) Melakukan pembinaan/ pembenahan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak eksternal.

3.3.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (Sasaran 1)

Pencapaian kinerja sasaran ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Berau melalui Inspektorat dalam melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Pembinaan dilakukan baik dalam bentuk informasi langsung saat rapat-rapat terhadap organisasi perangkat daerah maupun saat pelaksanaan pemeriksaan/ pengawasan sedangkan kedepannya akan dilaksanakan / diupayakan untuk dilaksanakan sosialisasi maupun bimbingan teknis yang berkaitan dengan SPIP jika dana tersedia. Selain itu melalui Pemeriksaan Reguler yang dilakukan oleh APIP Inspektorat



Kabupaten Berau kepada OPD, implementasi SPIP pada setiap OPD dapat dimonitoring. Dan untuk dapat mencapai target di akhir tahun renstra, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Disamping itu, alokasi anggaran yang memadai sangat diperlukan bagi tercapainya sasaran ini.

3.3.7 Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja (Sasaran 1)

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ini didukung dan dilaksanakan melalui 1 (satu) Program dengan 9 (Sembilan) kegiatan yaitu :

Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan kegiatan :

1. Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala
2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
3. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
4. Inventarisasi temuan pengawasan
5. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
6. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
7. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
8. Pembinaan,identifikasi dan penilaian risiko perangkat daerah
9. Pemberian / pelayanan jasa advice pengawasan

Sasaran 2 : Menurunnya Temuan Audit Kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dibawah target ;

Indikator keberhasilan dan capaian Kinerja sasaran Menurunnya Temuan Audit Kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dibawah target ; dapat dilihat pada tabel 3.11



Tabel 3.11

Capaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2016-2019

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2019	Realisasi 2019	% pencapaian target 2018 $5=3-(4-3)/3 \times 100$	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Menurunnya Temuan Audit Kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dibawah target	2	Jumlah opd dengan kinerja dibawah target	OPD	0	0	100 %	5	6	2
	% pencapaian menurunnya temuan Audit Kinerja Opd dibawah target						100 %			
	Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 untuk mendukung pencapaian sasaran 2						Rp. 4.354.000.000,-			
	Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019 untuk mendukung pencapaian sasaran 2						Rp. 4.044.935.539,- (92,90 %)			

Berdasarkan Tabel 3.11 tersebut maka dari 1 indikator yang ditetapkan Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis menurunnya temuan audit kinerja opd dibawah target yaitu sebagai berikut : Jumlah OPD (organisasi perangkat daerah) dengan kinerja dibawah target.

Jumlah OPD dengan kinerja di bawah target adalah salah satu alat untuk mengukur keberhasilan kinerja Inspektorat sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 yang merupakan komponen penting dalam rangka penurunan Temuan Audit Kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dibawah target di Kabupaten Berau.

Harapan Nasional menurunnya temuan audit kinerja OPD dibawah target pada tahun 2019 dari tahun ke tahun diharapkan semakin menurun. Kalimantan Timur mempunyai harapan yang sama yaitu diharapkan dari tahun ke tahun dapat mengalami penurunan jumlah opd dengan kinerja dibawah target, data Riil capaian Nasional dan Propinsi Tahun 2019 belum dapat kami peroleh. Untuk Kabupaten Berau pada tahun 2018 ini yaitu 2 OPD dengan kinerja dibawah target, tahun 2019 tidak terdapat atau 0 OPD dengan kinerja dibawah target di Kabupaten Berau.

Kondisi yang dicapai:

Pada tabel dibawah memperlihatkan bahwa pada tahun 2019, dari indikator kinerja "*Jumlah opd dengan kinerja dibawah target*" didapat capaian realisasi 0 opd atau dengan capain 100,00 % dari target 10 opd. Data ini ***menunjukkan adanya pencapaian memuaskan terhadap penurunan jumlah opd dengan audit kinerja dibawah target dan tetap dipertahankan untuk tahun-tahun selanjutnya.***

Tabel 3.12

Target dan Capaian Realisasi

Indikator Jumlah opd dengan kinerja di bawah target



Indikator Kinerja	Target 2019	Capaian Realisasi 2019
<i>Jumlah opd dengan kinerja dibawah target</i>	10 opd	0 opd (100,00 %)

alam upaya peningkatan Penurunan *Jumlah opd dengan kinerja dibawah target* tersebut, pada tahun 2019 Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat telah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu:

- 1) Melaksanakan Pembinaan, pendampingan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap Audit Kinerja pada Instansi Pemerintah, Lembaga Dinas, Kantor, Badan, Sekretariat, Kecamatan, Kelurahan dan Kampung.
- 2) Pencapaian sasaran 2 menurunnya Temuan Audit Kinerja OPD dibawah target tersebut Inspektorat Kabupaten Berau ini juga sudah menetapkan dalam PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) Tahun 2019 guna melaksanakan penilaian risiko, audit kinerja OPD yaitu melaksanakan Review RKA Perubahan APBD 2019 pada RAPBD 2018 terhadap Semua Dinas, Badan, Sekretariat dan Kantor Pemerintah Kabupaten Berau (60 obrik), Review RKA murni APBD 2019 terhadap Semua Dinas, Badan, Sekretariat dan Kantor Pemerintah Kabupaten Berau (60 obrik) yang terdiri dari 5 Badan, 24 Dinas, Sekretariat 3, Kecamatan 13, Kelurahan 10, dan Tambahan obrik (Kesbang, BPBD, KPU, Kantor Penghubung, Sekretriat KORPRI), Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Kesesuaian Visi, Misi, Program, Kegiatan, Out Put, Out Come, Sasaran, Tolok Ukur dan Penetapan Kinerja Pemerintah daerah dengan realisasinya), Evaluasi Renja / RKPD dan dokumen perencanaan lainnya.
- 3) Sasaran menurunnya Temuan Audit Kinerja OPD dibawah target tersebut Inspektorat Kabupaten Berau di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau ditunjang melalui Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan disertai dengan program penunjang lainnya yaitu Program Pelayanan administrasi perkantoran, Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan program Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.



4) Adapun Penunjang Program untuk mencapai sasaran 2 tersebut ada 6 Program yaitu :

1. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan kegiatan :
 - Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (21 orang) dengan dana sebesar Rp. 1.043.186.172,-
 - Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan Penilaian akuntabilitas kinerja (21 orang) dengan dana sebesar Rp. 162.780.000,-
 - Pengembangan wawasan aparat pengawasan Internal Pemerintah daerah (30 orang) dengan dana sebesar Rp.277.840.000,-
 - Sosialisasi dan peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP (2 kegiatan) Rp.200.000.000,-
2. Program Pelayanan Administrasi perkantoran dengan kegiatan
 - Penyediaan jasa surat menyurat (583 lembar) dengan dana sebesar Rp. 5.580.000,
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (12 bulan) sebesar Rp. 198.600.000,-
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional (31 unit) sebesar Rp. 360.000.000,
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan (23 orang) sebesar Rp. 129.808.000,-
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor (1438m²) sebesar Rp. 5.330.000,-
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (5 unit) sebesar Rp. 25.000.000,-
 - Penyediaan alat tulis kantor (20 jenis) sebesar Rp. 83.000.000,-
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (70 buah) sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor (5 jenis) sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Penyediaan 5 jenis peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp.451.361.000,-
 - Penyediaan 9 buah Peralatan rumah tangga sebesar Rp. 6.500.000,-
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 600 Eksemplar sebesar Rp.3.000.000,-



- Penyediaan makanan dan minuman (37 kali) sebesar Rp. 69.459.000,-
 - Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (28 ot) sebesar Rp. 400.000.000,-
 - Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (47 ok) dengan dana sebesar Rp. 70.000.000,-
 - Penyediaan jasa Tenaga administrasi / teknis perkantoran (9 orang) sebesar Rp. 291.400.000,-
3. Program Peningkatan sarana & prasarana aparatur dengan kegiatan :
- Pengadaan Kendaraan Dinas (1 Unit) dengan dana Rp. 451.942.000,-
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (1 kali) dengan dana Rp. 15.000.000,-
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (5 jenis) dengan dana Rp. 8.000.000,-
 - Pengadaan Teknologi Informasi Rp.0
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan
- Pengadaan Pakaian Batik (60 Stell) dana sebesar Rp. 35.000.000,-
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan :
- Sosialisasi Kinerja Program SKPD (1 kali) dengan dana sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (5 Dokumen) dengan dana sebesar Rp.17.500.000,-
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang berisi 2 kegiatan dimana untuk tahun 2019 belum tersedia anggarannya.

Secara keseluruhan Program yang mendukung tercapainya sasaran 2 yaitu terdiri dari 1 (satu) program prioritas dengan 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) program penunjang dengan 25 (dua puluh lima) kegiatan. Dengan total dana sebesar Rp. 4.354.000.000,- sedangkan sumber daya sebanyak 25 orang auditor, 4 Orang P2UPD dan 22 orang fungsional umum yang tergabung dalam Tim. Output, laporan hasil audit kinerja yaitu Review RKA Perubahan 2019 dan RKA 2019 serta dokumen perencanaan lainnya (Renja / RKPD Pemerintah dan OPD Kabupaten Berau sebanyak 311 laporan, Outcome, perangkat daerah yang telah

menindaklanjuti hasil review dokumen Perencanaan. Adapun realisasi indikator kinerja outcome tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

3.3.8 Membandingkan antara Target dan Realisasi kinerja tahun ini (Sasaran 2) :

Tabel 3.13
Perbandingan antara Target dan Realisasi

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Ket
Menurunnya temuan audit kinerja OPD di bawah target.	Jumlah OPD dengan kinerja di bawah target.	OPD	10	0	

Realisasi dana program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan untuk pencapaian sasaran 2 (dua) Menurunnya temuan audit kinerja OPD di bawah target sebesar Rp 1.564.981.369,- atau sebesar 92,68 % dari anggaran sebesar Rp 1.688.520.000,- Program Penunjang pencapaian sasaran 2 (dua) ini yaitu program Pelayanan Administrasi Kantor sebesar Rp. 2.117.038.000,- realisasi Rp. 1.947.073.570,- (91,97 %), Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur alokasi sebesar Rp. 474.942.000,- realisasi Rp. 462.483.000 (97,38%) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp.36.000.000,- realisasi Rp. 35.400.000,- (93,45%) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan alokasi sebesar Rp. 37.000.000,- realisasi Rp. 35.044.821 (93,45 %) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk tahun 2019 ini belum mendapatkan anggaran.

3.3.9 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (Sasaran 2):

Tabel 3.14

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016-2019

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Ket
2	Jumlah OPD dengan kinerja di bawah target.	OPD	5	6	2	0	

3.3.10 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Sasaran 2) :

Tabel 3.15

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Target jangka menengah dokumen perencanaan strategis organisasi	Selisih	Ket
1	Jumlah OPD dengan kinerja di bawah target.	OPD	0	10 opd	10	

3.3.11 Membandingkan realisasi tahun ini dengan standar nasional (Sasaran 2) :

Tabel 3.16

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Standar Nasional

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Standar Nasional	Selisih	Ket
1	Jumlah OPD dengan kinerja di bawah target.	OPD	0	-	-	Blm diperoleh data Nas

3.3.12 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan (Sasaran 2) :

- a. Faktor-faktor secara umum yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :
 - 1) Adanya komitmen pimpinan untuk memperkuat dan mengedepankan peran Inspektorat Kabupaten Berau sebagai penjamin kualitas, konsultan bagi tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.
 - 2) Adanya Komitmen OPD untuk memperbaiki menyempurnakan Dokumen Kinerja / Perencanaan.
 - 3) Adanya kerja sama yang baik antara Inspektorat Kabupaten Berau dengan Instansi terkait di bidang Pengawasan.
- b. Kendala-kendala yang menghambat pencapaian rencana kinerja ini adalah :
 - 1) Masih adanya Perangkat daerah yang belum menindaklanjuti rekomendasi / hasil Review / audit kinerja terhadap dokumen perencanaan pada waktu yang telah ditentukan.
 - 2) Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh perangkat daerah masih ada yang belum sesuai dengan rekomendasi yang diharapkan.
 - 3) Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut belum dilakukan secara optimal, hal ini juga disebabkan karena keterbatasan SDM serta sarana dan prasarana.



- c. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala – kendala yang merupakan penghambat dalam pencapaian rencana kinerja antara lain :
- 1) Koordinasi dengan obrik / perangkat daerah terkait agar temuan – temuan/ rekomendasi yang belum ditindaklanjuti segera ditindaklanjuti dan tindak lanjut yang tidak sesuai agar disesuaikan dengan rekomendasi.
 - 2) Orientasi dan peningkatan kualitas teknis pengawasan.
 - 3) Pemutahiran Data hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
 - 4) Perlu dilakukan penekanan pada saat pengawasan kepada OPD bahwa Inspektorat fungsinya melakukan pembinaan, konsultasi dan penjaminan kualitas.
 - 5) Melakukan pembinaan/pembenahan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak eksternal

3.3.13 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (Sasaran 2)

Pencapaian kinerja sasaran ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Berau melalui Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Menurunnya temuan audit kinerja OPD di bawah target melalui Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau beserta program penunjang lainnya. Pembinaan dilakukan baik dalam bentuk informasi langsung saat rapat-rapat terhadap organisasi perangkat daerah maupun saat pelaksanaan Review / pemeriksaan/ pengawasan terhadap audit kinerja. Disadari bahwa pada Tahun 2019 ini masih belum terjadwalkan secara keseluruhan untuk komponen pelaksanaan audit kinerja.

Hal ini disebabkan karena keterbatasan tenaga Audit Kinerja (P2UPD) yang masih terbatas, namun demikian Pihak Pemerintah Kabupaten Berau dalam hal ini Inspektorat tetap berupaya memaksimalkan kondisi dan SDM yang ada yaitu dengan dirangkap oleh tenaga Auditor dan fungsional audit lainnya.

Dan untuk dapat mencapai target di akhir tahun renstra, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik dari seluruh OPD di lingkungan



Pemerintah Kabupaten Berau. Disamping itu, penambahan / pengisian tenaga P2UPD serta alokasi anggaran yang memadai sangat diperlukan bagi tercapainya sasaran ini.

3.3.14 Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja (Sasaran 2)

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ini didukung dan dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas dengan 5 (lima) program pendukung yaitu :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan 9 (sembilan) kegiatan.
2. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan 4 (empat) kegiatan.
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16 (enam belas) kegiatan.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 (empat) kegiatan.
5. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan 2 (dua) kegiatan.
6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 (satu) kegiatan.
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 (dua) kegiatan.

Dalam menentukan keberhasilan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Berau mengacu kepada pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi input, output dan outcome.

3.4 Realisasi Anggaran

a. Input

1) Dana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Berau tahun anggaran 2019 didukung dengan dana sebesar Rp 17.851.325.000,- terdiri dari belanja Tidak langsung Rp sebesar Rp. 8.131.325.000,- dan belanja Langsung sebesar Rp. 9.720.000.000,- detilnya dapat dilihat pada table sebagai berikut :



a. Belanja tidak langsung :

Tabel 3.17
Belanja Tidak Langsung

TAHUN	Belanja Tidak Langsung	Anggaran (Rp.)	Ket
2018	Gaji dan Tunjangan	6.528.700.000,00	
2019	Gaji dan Tunjangan	8.131.325.000,00	

Sumber data Subbag Keu dan Aset

b. Belanja Langsung

Tabel 3.18
Belanja Langsung

TAHUN	Belanja Langsung	Anggaran (Rp)	Keterangan (silpa)
2018	Operasional Rutin dan Program Strategis Itkab	6.442.726.000,-	825.906.585,-
2019	Operasional Rutin dan Program Strategis Itkab	8.840.566.052	879.433.948,-

Sumber data Subbag Keu dan Aset

2) SDM

Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat pada tahun 2019 Sampai dengan akhir Desember tahun 2019 dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional P2UPD dan Angka Kreditnya. Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Berau sebanyak 60 orang yang terdiri dari PNS berjumlah 53 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berjumlah 8 orang. Terinci dalam tabel berikut :

Tabel. 3.19
Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat dan golongan serta jenis kelamin & pendidikan Per 31 Desember 2019

TAHUN	Pangkat / Gol. Ruang	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jumlah Pegawai
-------	----------------------	---------------	------------	----------------



	IV	III	II	PTT	L	P	S2	S1	SM/ D3	SLA	SLP	SD	
2018	11	32	9	8	35	17	8	28	1	15			52
2019	11	32	10	8	35	18	9	29	1	14			53

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Itkab. Berau

Tabel. 3.20
Jumlah pegawai berdasarkan jabatan
Per 31 Desember 2019

No.	JABATAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019
		Jumlah (Orang)	Jumlah (Orang)
1.	Inspektur	1 Orang	1 Orang
2.	Sekretaris	1 Orang	1 Orang
3.	Inspektur Pembantu	4 Orang	4 Orang
4.	Kepala Sub Bagian	3 Orang	3 Orang
	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 Orang	1 Orang
	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1 Orang	1 Orang
	Pengelola Data	1 Orang	1 Orang
	Pengelola Kepegawaian	1 Orang	1 Orang
	Pengadministrasi Umum	1 Orang	2 Orang
No.	JABATAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019
		Jumlah (Orang)	Jumlah (Orang)
	Pengelola Surat	1 Orang	1 Orang
	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	1 Orang	1 Orang
	Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	1 Orang	1 Orang
	Pengelola Pengawasan	- Orang	- Orang
	Sekretaris	1 Orang	1 Orang



	Pramu Bakti	- Orang	- Orang
	Pengemudi	- Orang	- Orang
	Petugas Keamanan	- Orang	- Orang
	Pengadministrasi Keuangan	1 Orang	1 Orang
	Bendahara	1 Orang	1 Orang
	Verifikator Keuangan	1 Orang	2 Orang
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1 Orang	1 Orang
5.	Jabatan Fungsional Audit (Auditor)	25 Orang	24 Orang
	Calon Jabatan Fungsional Audit	- Orang	- Orang
6.	Pemeriksa P2UPD	5 Orang	4 Orang
	Calon Pemeriksa	- Orang	- Orang
Jumlah		52 Orang	53 Orang

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Itkab. Berau

Tabel. 3.21

Norma Jabatan Inspektorat Kabupaten berau

No.	JABATAN	TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		Jumlah (Orang)		Jumlah (Orang)	
		Riil	Norma	Riil	Norma
1.	Struktural	9	9	9	9
2.	Fungsional Auditor	25	67	25	67
3.	Calon Auditor	0	0	0	0
4.	Fungsional Pengawas (P2UPD)	5	31	4	31
5.	Calon Pengawas	-	0	-	0
6.	Fungsional Umum	13	18	15	18
Jumlah		52	118	53	118

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Itkab. Berau

3). Sarana dan Prasarana



Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Inspektoraat Kabupaten Berau dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik sekalipun sebagian usianya sdh dapat dikatakan lama namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Sampai dengan akhir Desember 2019 sarana kerja yang dimiliki Inspektoraat Kab. Berau adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel. 3.22
Sarana Kerja Inspektoraat Kabupaten Berau

No.	SARANA KERJA YANG	TAHUN 2018		TAHUN2019	
	TERSEDIA	JUMLAH	KONDISI	JUMLAH	KONDISI
1	Tanah Kantor	1521 M2	Baik	1521 M2	Baik
2	Kendaraan Roda 4	10 Unit	Baik	11 Unit	Baik
3	Kendaraan Roda 2	27 Unit	Baik	26 Unit	Baik
4	Personal Computer	9 Unit	Baik	12 Unit	Baik
5	Note Book	20 Unit	Baik	20 Unit	Baik
6	Laptop	23 Unit	Baik	31 Unit	Baik
7	Printer	50 Unit	Baik	63 Unit	Baik
8	Mesin Ketik Manual	3 Unit	Baik	3 Unit	Baik
9	Mesin Ketik Elektronik	2 Unit	Baik	2 Unit	Baik
10	Mesin Hitung/Kalkulator	15 Unit	Baik	15 Unit	Baik
11	Mesin Foto Copy	2 Unit	Baik	2 Unit	Baik
12	Telepon	4 Unit	Baik	4 Unit	Baik
13	Faximilli	- -	-	1 Unit	Baik
14	AC	15 Unit	Baik	13 Unit	Baik
15	TV	4 Unit	Baik	4 Unit	Baik
16	Alat Ukur	1 Unit	Baik	9 Unit	Baik
17	Kamera	12 Unit	Baik	12 Unit	Baik
18	Lemari	23 Unit	Baik	23 Unit	Baik
19	Scanner	2 Unit	Baik	3 Unit	Baik
20	Filling Besi	3 Unit	Baik	3 Unit	Baik
21	Ember Plastik	1 Unit	Baik	1 Unit	Baik
22	Alat Penghancur Kertas	1 Unit	Baik	1 Unit	Baik
23	Papan Pengumuman	1 Unit	Baik	1 Unit	Baik
24	Papan Tulis	1 Unit	Baik	1 Unit	Baik
25	White Board	4 Unit	Baik	4 Unit	Baik
26	Rak Kayu	2 Unit	Baik	2 Unit	Baik
27	Kursi Besi	1 Unit	Baik	1 Unit	Baik
28	Kursi Kayu	3 Unit	Baik	3 Unit	Baik
29	Meja Tulis	7 Unit	Baik	7 Unit	Baik
30	Meja Resepsion	- -	-	1 Unit	Baik



31	Kursi Rapat	3	Unit	Baik	53	Unit	Baik
32	Kursi Tamu	3	Unit	Baik	3	Unit	Baik
33	Kursi Putar	10	Unit	Baik	10	Unit	Baik
34	Kursi Biasa	2	Unit	Baik	2	Unit	Baik
35	Kursi Lipat	6	Unit	Baik	6	Unit	Baik
36	Meja Komputer	6	Unit	Baik	6	Unit	Baik
37	Meja Piket	1	Unit	Baik	1	Unit	Baik
38	Meja Biro	4	Unit	Baik	4	Unit	Baik
39	Sofa	1	Unit	Baik	1	Unit	Baik
40	Kursi Plastik	9	Unit	Baik	9	Unit	Baik
41	Kursi Kerja	10	Unit	Baik	20	Unit	Baik
42	Jam Mekanis	11	Unit	Baik	11	Unit	Baik
43	Lemari Es	2	Unit	Baik	2	Unit	Baik
44	Kipas Angin	3	Unit	Baik	3	Unit	Baik
45	Kompore Gas	1	Unit	Baik	1	Unit	Baik
46	Kompore Minyak	1	Unit	Baik	1	Unit	Baik
47	Alat Dapur Lainnya	5	Unit	Baik	5	Unit	Baik
48	Piring	-	-	-	5	Unit	Baik
49	Gelas	-	-	-	5	Unit	Baik
50	Sendok	-	-	-	10	Unit	Baik
51	Talam	-	-	-	4	Unit	Baik
52	Loudspeaker	2	Unit	Baik	2	Unit	Baik
53	Wireles	-	-	-	1	Unit	Baik
54	Dispenser	5	Unit	Baik	5	Unit	Baik
55	CPU	2	Unit	Baik	2	Unit	Baik
56	Keyboard	2	Unit	Baik	2	Unit	Baik
57	Apple Macbook Air	-	-	-	1	Unit	Baik
58	Ipad Mini 5/256 Gb	-	-	-	1	Unit	Baik
59	Ipad Mini/256 Gb	-	-	-	1	Unit	Baik
60	Monitor	4	Unit	Baik	4	Unit	Baik
61	Peralatan Personal Komputer	1	Unit	Baik	1	Unit	Baik
62	Hardisk Eksternal	2	Unit	Baik	2	Unit	Baik
63	Server	1	Unit	Baik	1	Unit	Baik
64	Meja Kerja	35	Unit	Baik	45	Unit	Baik
65	Meja Rapat	12	Unit	Baik	12	Unit	Baik
66	Kursi Kerja	30	Unit	Baik	30	Unit	Baik
67	Kursi Hadap Depan Meja Pejabat	1	Unit	Baik	1	Unit	Baik
68	Buffet	5	Unit	Baik	5	Unit	Baik
69	Micropone	-	-	-	2	Unit	Baik
70	UPS	7	Unit	Baik	7	Unit	Baik
71	Slide Projector	1	Unit	Baik	1	Unit	Baik
72	Alat Kesehatan Perawatan	1	Unit	Baik	1	Unit	Baik
73	Concrete Hammer Test	4	Unit	Baik	4	Unit	Baik
74	Personal Computer	2	Unit	Baik	2	Unit	Baik
75	Gentong Plastik	2	Unit	Baik	2	Unit	Baik
76	Gelas Minum	1	Unit	Baik	1	Unit	Baik



77	Recorder	4 Unit	Baik	4 Unit	Baik
78	Lambang Garuda	1 Unit	Baik	1 Unit	Baik
79	Gambar Presiden	1 Unit	Baik	2 Unit	Baik
80	Gambar Wakil Presiden	2 Unit	Baik	2 Unit	Baik
81	Alat Lab Air dan Tanah	22 Unit	Baik	22 Unit	Baik
82	Software Cont Off-line Computer	1 Unit	Baik	1 Unit	Baik
83	Ensidlopedia,Kamus,Buku Refrensi	27 Unit	Baik	27 Unit	Baik
84	Digital Audio Tape Recorer	1 Unit	Baik	1 Unit	Baik

- 4). Obyek Pemeriksaan Obyek pemeriksaan yang diaudit sebanyak 60 obrik sesuai dengan PKPT 2019 yang terdiri dari 5 Badan, 24 Dinas, Sekretariat 3, Kecamatan 13, Kelurahan 10, dan Tambahan obrik (Kesbang, BPBD, KPU, Kantor Penghubung, Sekretraiat KORPRI). Selanjutnya Pemeriksaan pada 100 Kampung dan 40 pemeriksaan khusus/kasus Pengaduan, serta Review Laporan Keuangan Pemda/ OPD (pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta semua Dinas, Badan, Sekretariat dan Kantor Pemerintah Kabupaten Berau), Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (pada Pemerintah Kabupaten Berau, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sistem AKIP) dan pencapaian kinerja organisasi (Evaluasi Lakip semua Dinas, Badan, Sekretariat dan Kantor Pemerintah Kabupaten Berau), Bantuan Propinsi yang bersifat spesifik (Bosda Propinsi, Tambahan Penghasilan Guru dan Tutor Paud dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)), Sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Wilayah Kabupaten Berau - (80 Sekolah penerima BOSDA), Review RAPBD 2019 Perubahan (pada Semua Dinas, Badan, Sekretariat dan Kantor Pemerintah Kabupaten Berau), Review RAPBD 2019 Murni pada Semua Dinas, Badan, Sekretariat dan Kantor Pemerintah Kabupaten Berau) Penilaian Risiko pada 12 OPD dan Audit Kinerja.

b. Output

Jumlah Hasil audit Pengawasan / Pemeriksaan dan Pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan Program Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan yaitu yang dilaksanakan sebanyak 60 obrik, 29 pemeriksaan khusus/kasus pengaduan, Pemeriksaan 100 Kampung, Review Laporan Keuangan Pemda/ SKPD, Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sistem AKIP) dan



pencapaian kinerja organisasi (Evaluasi Lakip), Bantuan Propinsi yang bersifat spesifik (Bosda Propinsi, Tambahan Penghasilan Guru dan Tutor Paud dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)), (80 Sekolah penerima BOSDA), Pemeriksaan terhadap Opname Kas Triwulan IV pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, BAPLITBANG, Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan & Kearsipan, Kec. Batu Putih, Opname Kas Triwulan IV pada Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan, Dinas PU & Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Kec. Pl. Derawan, Opname Kas Triwulan IV pada Dinas Perkebunan, Satpol PP, Diskoperindag, Kesbang-Pol, Opname Kas Triwulan IV pada DPP-KB-PP & PA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan sampai dengan bulan Desember 2019 laporan hasil evaluasi LAKIP SKPD 47 laporan, hasil review LAKIPDA 1 laporan, review revisi RPJMD, review LKPD 2019 1 laporan. Detil sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.23
Pengukuran Pencapaian Program Penunjang Indikator
Kinerja Utama 2017-2021
Pengukuran Pencapaian Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN	KETERANGAN			
									Internal Berkala	Rencana	Realisasi	
1	Menurunnya temuan yang terindikasi tindak pidana korupsi	Jumlah temuan yang terindikasi tindak pidana korupsi	10 Temuan	0 Temuan	100	Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengawasan Internal secara berkala obrik yang diperiksa	79,42%	Internal Berkala	Rencana	Realisasi	
									Reviu Laporan Keuangan Pemda/OPD	1	1	
									Reviu Laporan Lakip Pemda	1	1	
									Evaluasi Lakip Semua OPD	47	47	
									Sekolah penerima BOSDA Wilayah Kabupaten Berau	80	80	
									Review RKA Perubahan APBD 2018 (Semua OPD)	47	0	
									Review RKA Mumi APBD 2019 (Semua OPD)	47	47	
									Reviu RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)	1	1	
									Pemeriksaan Khusus	40	29	
									Reviu Revisi RPJMD	0	1	
									Reviu LPPD	1	1	
									Penilaian Risiko pada 12 OPD	12	12	
Jumlah	277	220										
								Penanganan kasus pengaduan	72,50 %	Khusus	Pengaduan	Realisasi



							n dilingkung an pemerinta h daerah kasus yang diperiksa		Dilingkungan Pemerintah Daerah	40	29
							Penangan an kasus pada wilayah pemerinta han dibawahny a kasus yang diperiksa	100%	Kasus Dibawahnya	Renc ana	Real isasi
							Jumlah tindak lanjut hasil temuan pengawas an internal berkala	11,56 %	Jumlah Temuan yang sudah ditindak lanjuti		Jum lah Tem uan
							Jumlah tindak lanjut temuan pengawas an khusus dilingkung an Pemerinta h Daerah	100%			Jum lah Tem uan
							Jumlah tindak lanjut hasil temuan pengawas an yang dilaporkan pengawas an khusus pada Pemerinta h dibawahny a	14,17%	Jumlah Temuan yang sudah ditindak lanjuti		Jum lah Tem uan
2	Menurunnya temuan audit kinerja OPD dibawah target	Jumlah OPD dengan kinerja dibawah target	10 OPD	0 OPD	80,00	Program Peningkata n Profesionalisme	Pelatihan pengemba ngan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas an	92,68%	Indikator	Renc ana	Real isasi
						Program Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan Administra si Perkantor an	91,97%	Jumlah Peserta Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa &Aparatur pengawas an	100	92,6 8%
						Program Peningkata n sarana dan prasarana aparatur	Peningkat an sarana dan prasarana aparatur	97,38%	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100 %	91,9 7%
						Program Peningkata n disiplin aparatur	Peningkat an Disiplin Aparatur	98,33%	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal	100 %	97,3 8%
						Program Peningkata n pengemban gan system pelaporan	Peningkat an pengemba ngan system pelaporan capaian kinerja	112%	Persentase Kehadiran Pegawai Sesuai Jam Kerja	100 %	98,3 3%
									Nilai LKJIP	85,50	95,4 6



							dan keuangan				
Pencapaian Sasaran Kinerja (IKU) Tahun 2019 dengan kategori / Predikat (berhasil)				100	Pencapaian Penunjang Sasaran Kinerja (IKU) Inspektorat			79,09%	A		

c. Outcome

Peningkatan Pencapaian Kinerja dengan menurunnya Temuan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi dan menurunnya temuan Audit Kinerja OPD dibawah target.





BAB. IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

1. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2019 merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (Performance Government) sebagai kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindak lanjuti dengan Permenpan 53 Tahun TA 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
2. Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2019 merupakan bagian dari pengukuran kinerja dalam melaksanakan Renstra Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 dan merupakan dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja dalam bidang Pengawasan yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.
3. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Pencapaian sasaran 1 (satu) Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi untuk Tahun 2018 dengan 3 temuan (77,66 %) dan Tahun 2019 dengan 0 temuan (100 %) terjadi peningkatan pencapaian Kinerja dari Tahun 2018 ke Tahun 2019 sebesar 22,34 %
 - b. Pencapaian sasaran 2 (dua) Menurunnya Temuan Audit Kinerja OPD dibawah target pada tahun 2018 terdapat 2 OPD (80,00%), tahun 2019 ada 0 opd (100,00%) dengan Audit Kinerja OPD dibawah target. Terjadi peningkatan pencapaian kinerja dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 20,00 %. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor,yaitu :



- Penyebab utama tercapainya target di atas adalah adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Inspektorat dengan OPD dalam melakukan pembenahan di dokumen SAKIP, mulai dari dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun pencapaian sasaran kinerja.
 - Tenaga P2UPD yang walaupun masih terbatas tapi sudah terbentuk untuk melakukan pembinaan terhadap audit kinerja OPD.
 - Untuk mengoptimalkan pelaksanaan selama ini masih dilaksanakan/ dirangkap oleh Tenaga Auditor Pengawas yang juga kondisinya masih terbatas, dengan adanya P2UPD maka kinerja Inspektorat tentunya akan lebih maksimal lagi.
 - Dukungan anggaran pelaksanaan pengawasan yang sangat berdampak terhadap pencapaian kinerja baik dari Inspektortat maupun pencapaian kinerja Kabupaten Berau.
- c. Secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lazim. Dan pertanggung jawabannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu efektif dan efisien.
- d. Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Kegiatan maka pencapaian Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Berau tahun 2019 **adalah 100 %** berdasarkan skala ordinal maka capaian tersebut dapat dikategorikan “ Sangat Berhasil” (82 - 100). Bila dihitung dengan sasaran kinerja yang sama dengan data capaian tahun 2019 maka diperoleh pencapaian Tahun 2019 pencapaian sasaran 1 adalah 0 temuan (100 %) dan pencapaian sasaran 2 adalah 0 opd (100 %) maka rata rata pencapaian Kinerja Tahun 2019 yaitu 100 % (kategori sangat berhasil).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan *stakeholders*, sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.2 Saran / Langkah dimasa mendatang

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan, secara umum pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2019 sudah optimal untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun tetap diperlukan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja. Tidak kalah pentingnya kapabilitas Inspektorat perlu ditingkatkan dengan mengalokasikan SDM dan Anggaran pengawasan yang lebih kompeten karena peran yang diemban sebagai penjaminan kualitas, mengawal dan bertindak sebagai konsultan bagi OPD lain. Tentunya dengan peran seperti ini kualitas dan kuantitas Inspektorat seharusnya jauh lebih baik dibandingkan dengan OPD lainnya termasuk Anggaran peningkatan pelaksanaan Pengawasan program Strategis pada Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dan Peningkatan kapabilitas Aparatur Pengawas pada Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan perlu dialokasikan secara Proporsional karena tenaga dan anggaran yang tersedia masih sangat kurang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019 untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya.

Tanjung Redeb, 27 Januari 2020

Inspektorat Kabupaten Berau

Inspektur,

Ir.H.Riza Fakhmi
Pembina TK.I
NIP. 19671001 199803 1 007



LAMPIRAN – LAMPIRAN



**RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN 2019**

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN					KET		
URAIAN	INDIKATOR	Rencana Tingkat capaian (Target)			URAIAN	INDIKATOR	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)				
		Satuan	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Menu runny a temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	Jumlah temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	temuan	10	20	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	01	Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala	Input	Tersedianya dana	Rp.	2.230.000.000,-
									Output	Jumlah Pengawasan internal secara berkala (Obri yang diperiksa)	Obrik	60
									Outcome	Pemeriksaan reguler, Reviw Keuangan dan Evaluasi LAKIP	%	100
							02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Input	Tersedianya dana	Rp.	845.000.000,-
									Output	Jumlah kasus pengaduan yang ditangani	kasus/laporan	40
									Outcome	Persentase Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah kasus yang diperiksa	%	100
							04	Penanganan	Input	Tersedianya dana	Rp.	1.195.000.000,-



							Out Come	Terpenuhinya perbaikan peralatan kerja	%	100	
					10	Penyediaan alat tulis kantor	Input	Tersedianya dana	Rp.	83.000.000,-	
				Out Put			Jenis ATK yang disediakan	Jenis	20		
				Out Come			Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	%	100		
					11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Input	Tersedianya dana	Rp.	15.000.000,-	
				Out Put			Jumlah Dokumen yang dicetak	Buah	70		
				Out Come			Terpenuhinya barang cetakan dan pengandaan	%	100		
					12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Input	Tersedianya dana	Rp.	3.000.000,-	
				Out Put			Jenis Peralatan Listrik yang disediakan	Jenis	5		
				Out Come			Terpenuhinya komponen listrik, penerangan bangunan kantor	%	100		
					13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Input	Tersedianya dana	Rp.	451.361.000,-	
				Out Put			Jenis Peralatan Listrik yang disediakan	Unit	5		
				Out Come			Terpenuhinya komponen listrik, penerangan bangunan kantor	%	100		



								Input	Tersedia nya dana	Rp.	6.500.000,-			
								Out Put	Jenis Peralatan Listrik yang disediakan	Buah	9			
								Out Come	Terpenuhinya komponen listrik, penerangan bangunan kantor	%	100			
								14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input	Tersedia nya dana	Rp.	3.000.000	
										Out Put	Jenis Peralatan Listrik yang disediakan	Eksemplar	600	
										Out Come	Terpenuhinya komponen listrik, penerangan bangunan kantor	%	100	
								15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input	Tersedia nya dana	Rp.	69.459.000,-	
										Out Put	Jumlah Makanan minum rapat dan tamu	37	Kali	
										Out Come	Terpenuhinya makan minum rapat dan tamu	%	100	
								17	Penyediaan makanan dan minuman	Input	Tersedia nya dana	Rp.	400.000.000,-	
										Out Put	Jumlah Kordinasi Dan konsultasi keluar daerah	OT	28	
										Out Come	Tercapainya rapat rapat koordinasi Inspekto	%	100	
18	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Input	Tersedia nya dana	Rp.	400.000.000,-									
		Out Put	Jumlah Kordinasi Dan konsultasi keluar daerah	OT	28									
		Out Come	Tercapainya rapat rapat koordinasi Inspekto	%	100									



							Input	Tersedia nya dana	Rp.	17.500.000,-	
							Out Put	Jumlah Dokume n perenca naan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dok ume n	5	
							Out Come	Tersedia nya dokume nperenc anaan dan laporan capaian kinerja SKPD	%	85.5	
							JUMLAH		Rp.	9.720.000.00 0,-	

Tanjung Redeb, 02 Januari 2019
Inspektur Inspektorat Kab Berau,

Drs.H.Suriansyah,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19590408 198501 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
INSPEKTORAT

Jalan SM. Aminuddin Nomor : 1012 Telepon (0554) 22438, Fax/Telepon (0554) 21573

TANJUNG REDEB

inspektorat.berau@gmail.com

<http://inspektorat.beraukab.go.id>

KODE POS 77312

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir.H.Riza Fakhmi

Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. MUHARRAM, S.Pd, MM

Jabatan : Bupati Berau

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Bupati Berau,



H. MUHARRAM, S.Pd, MM

Tanjung Redeb, 06 Januari 2020

Pihak Pertama,
Inspektorat Kab. Berau
Inspektur,



Ir.H.Riza Fakhmi

Pembina TK.I

NIP. 19671001 199803 1 007

Scanned by CamScanner



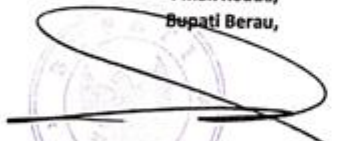
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTUR
Inspektorat Kabupaten Berau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	Jumlah temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	Temuan	10
2	Menurunnya temuan audit kinerja OPD di bawah target.	Jumlah OPD dengan kinerja di bawah target.	OPD	10

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	4.626.100.000	
2	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	676.698.000	
3	Program Pelayanan administrasi perkantoran	1.559.334.000	
4	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	99.000.000	
5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	

Tanjung Redeb, 06 Januari 2020

Pihak Kedua,
Bupati Berau,



H. MUHARRAM, S.Pd, MM

Pihak Pertama,
Inspektorat Kab. Berau
Inspektur,



Ir. H. Riza Fakhmi
Pembina TK.I
NIP. 19671001 199803 1 007

Scanned by CamScanner



**PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2019**

SASARAN					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	REALISASI		KET			
URAIAN	INDIKATOR	Rencana Tingkat capaian (Target)								Rp.	% Capaian Target				
		Satuan	Target	Realisasi											
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	Jumlah temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	temuan	10	0	20	Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala	Input	Tersedianya dana	Rp.	2.230.000.000,-	2.161.169.847	96,91		
								Output	Jumlah Pengawasan internal secara berkala (Obrik yang diperiksa)	Obrik	60	60	100		
								Outcome	Pemeriksaan reguler, Reviw Keuangan dan Evaluasi LAKIP	%	100	100	100		
							20	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Input	Tersedianya dana	Rp.	845.000.000,-	776.416.400	91,88	
									Output	Jumlah kasus pengaduan yang ditangani	kasus / laporan	40	29	72,5	
									Outcome	Persentase Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah kasus yang diperiksa	%	100	72,5	72,5	
							20	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Input	Tersedianya dana	Rp.	1.195.000.000,-	1.033.695.000,-	86,50	
									Output	Jumlah kampung ditangani penanganan kasus	kampung	100	100	100	
									Outcome	Pemeriksaan kasus diwilayah Kecamatan / Kampung	%	100	100	100	
						05	Inventarisasi	Input	Tersedianya dana	Rp.	192.000.000,-	186.678.593	97,23		



								ayanan Jasa Advice Pengaw asan	Out Put	Jumlah temuan yang dievaluasi	te mu an	1	2	100		
									Out Com e	Terevaluasi ya temuan hasil pengawasan	%	100	100	100		
2	Menurunnya temuan audit kinerja OPD di bawah target.	Jumlah OPD dengan kinerja di bawah target.	opd	10	0	2	1	Pelatih an pembe ngan tenaga pemer iksa dan aparatu r pengaw asan	Inpu t	Tersedianya dana	Rp.	1.047.9 00.000, -	1043.18 6.172	99. 55		
									Out Put	Jumlah peserta Pelatihan pembe ngan tenaga pemer iksa & aparat ur pengawasan	Ora ng	21	40	190 .48		
									Out Com e	Tenaga Pemer iksa dan aparat ur pengawasan yang terampil	%	100	190.48	190 .48		
									Inpu t	Tersedianya dana	Rp.	162.78 0.000,-	109.918 .085	67. 53		
									Out Put	Jumlah peserta Pelatihan pembe ngan tenaga pemer iksa & aparat ur pengawasan	Ora ng	21	19	90. 48		
									Out Com e	Tenaga Pemer iksa dan aparat ur pengawasan yang terampil	%	100	90.48	90. 48		
								0 3	Pelatih an Tekhnis Pengaw asan dan Penilai an Akunta bilitas Kinerja	Inpu t	Tersedianya dana	Rp.	277.84 0.000,-	273.858 .902	98. 57	
										Out Put	Jumlah peserta Pelatihan pembe ngan tenaga pemer iksa & aparat ur pengawasan	Ora ng	30	30	100	
										Out Com e	Tenaga Pemer iksa dan aparat ur pengawasan yang terampil	%	100	100	100	
								0 4	Penge mbang an Wawas an apar at Pengaw asan Intern al Pemer intah Daerah	Inpu t	Tersedianya dana	Rp.	200.00 0.000,-	138.081 .210	69. 01	
										Out Put	Jumlah peserta Pelatihan pembe ngan tenaga pemer iksa & aparat ur pengawasan	Ke gia tan	2	1	50. 00	
								0 5	Sosialis asi dan Pening katan Maturit as SPIP dan Kapabil tas	Inpu t	Tersedianya dana	Rp.	200.00 0.000,-	138.081 .210	69. 01	
Out Put	Jumlah peserta Pelatihan pembe ngan tenaga pemer iksa & aparat ur pengawasan	Ke gia tan	2	1	50. 00											



							Out Come	Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-		
							Input	Tersedianya dana	Rp.	20.000.000,-	20.000.000	100			
						5	Out Put	Jumlah sosialisasi kinerja program SKPD melalui pameran yang diikuti	Kali	1	1	100			
							Out Come	Persentase sosialisasi kinerja program SKPD melalui pameran yang diikuti	%	100	100	100			
							Input	Tersedianya dana	Rp.	17.500.000,-	15.044.821	85.97			
						9	Out Put	Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	Dokumen	5	5	100			
							Out Come	Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	%	85.5	100	100			
							JUMLAH			Rp.	9.720.000.000,-	8.840.566.052	90,95		

Tanjung Redeb, 27 Januari 2020
Inspektur Inspektorat Kab Berau,

Inspektur,

Ir.H.Riza Fakhmi
 Pembina TK.I
 NIP. 19671001 199803 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. SM. Aminuddin Nomor : 1012 Telepon (0554) 21060, Fax/Telepon(0554) 21573

TANJUNG REDEB

inspektorat_berau@gmail.com

<http://inspektorat.beraukab.go.id>

KODE POS 77312

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KABUPATEN BERAU TAHUN 2017-2021**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	Jumlah temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	Temuan	Mengukur pencapaian target temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	Formulasi : (Jumlah temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi dibagi Target Jumlah Pemeriksaan Reguler) x 100%
2	Menurunnya temuan audit kinerja OPD di bawah target.	Jumlah OPD dengan kinerja di bawah target.	OPD	Mengukur pencapaian target temuan / audit OPD dengan kinerja di bawah target.	Formulasi : (Jumlah OPD dengan kinerja dibawah target dibagi Jumlah OPD Pemeriksaan Reguler) x 100%

Tanjung Redeb, 02 Januari 2020
Inspektorat Kabupaten Berau



Ir.H.Riza Fakhmi
Pembina TK.I

NIP. 19671001 199803 1 007

Scanned by CamScanner



Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Berau yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan ke 6 RPJMD : Mewujudkan pemerintah yang bersih, transparan, profesional dan akuntabel

Sasaran RPJMD : Terciptanya Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi

No.	INDIKATOR KINERJA SASARAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (TAHUN 2016)	Target Kinerja Program PERTAHUN					kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	15	13	13	10	10	10	10
2	Jumlah OPD dengan kinerja di bawah target.	15	13	13	10	10	10	10

Tanjung Redeb, 02 Januari 2020
Inspektorat Kabupaten Berau

Inspektur,



Ir.Riza Fakhmi
Pembina TK.I
NIP. 19671001 199803 1 007

Scanned by CamScanner



Inspektorat Kabupaten Berau

Matrix Renstra (Perubahan September 2019)

INSPEKTORAT KABUPATEN BRAU

No.	Sasaran Permasalahan Pokok	Kode Rekening	Usuran / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Data Capaian pada Tahun	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Kinerja Renstra SKPD	SKPD		
						2016		2017		2018		2019		2020				2021	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
						7	8	9	10	11	12								
1	Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	305701	Inspektorat	Urusan wajib Inspektorat	100%	100%	8,726,271,000	6,147,625,000	6,263,600,000	8,796,962,000	9,973,660,000	9,973,660,000	Inspektorat						
		01	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase unit kerja Internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	1,858,469,000	1,289,078,000	1,200,000,000	1,230,000,000	2,158,198,000	2,158,198,000							
		12070101	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang bermaterai /berperangko	500 lembar	583 lembar	4,080,000	4,080,000	583 lembar	5,580,000	583 lembar	5,580,000	642 lembar	5,580,000					
		12070102	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	133,000,000	198,600,000	12 bulan	130,600,000	12 bulan	198,600,000	12 bulan	198,600,000					
		12070106	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diservice, ganti suku cadang, KIR dan mendapat BBM	31 unit	31 unit	490,600,000	440,600,000	31 unit	315,000,000	31 unit	360,000,000	31 unit	370,000,000					
		12070107	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan tim penilai angka kredit fungsional	20 orang	20 orang	206,000,000	116,296,000	23 orang	112,708,000	23 orang	129,808,000	23 orang	157,468,000					
		12070108	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang dibersihkan	1438 m2	1438 m2	5,330,000	5,330,000	1438 m2	5,330,000	1438 m2	5,330,000	1438 m2	5,330,000					
		12070109	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	5 unit	5 unit	26,305,000	25,000,000	5 unit	25,000,000	5 unit	25,000,000	5 unit	25,000,000					
		12070110	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis ATK yang disediakan	20 jenis	20 jenis	60,000,000	45,000,000	20 jenis	59,844,000	20 jenis	83,000,000	20 jenis	83,000,000					
		12070111	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Dokumen yang dicetak	70 buah	70 buah	16,000,000	15,000,000	70 buah	15,000,000	70 buah	15,000,000	70 buah	17,500,000					
		12070112	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jenis Peralatan Listrik yang disediakan	5 jenis	5 jenis	3,160,000	3,000,000	5 jenis	3,000,000	5 jenis	3,000,000	5 jenis	4,000,000					
		12070113	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor	10 jenis	10 jenis	187,180,000	0	4 jenis	128,176,000	5 jenis	451,361,000	10 jenis	451,361,000					
		12070114	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga	6 buah	6 buah	2,255,000	0	9 buah	3,000,000	9 buah	6,500,000	9 buah	6,500,000					
		12070115	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bacaan yang disediakan	12000 eksmplar	12540 eksmplar	62,700,000	0	600 eksplr	3,000,000	800 eksplr	3,000,000	800 eksplr	3,000,000					
		12070117	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan minum rapat dan tamu	35 kali	35 kali	25,000,000	25,000,000	45 kali	45,000,000	37 kali	69,459,000	37 kali	69,459,000					
		12070118	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Kordinasi Dan konsultasi keluar daerah	30 ot	61ot	417,659,000	27ot	186,972,000	28 ot	227,588,000	28 ot	400,000,000	40 ot	400,000,000				
		12070119	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah koordinas dan konsultasi ke dalam daerah	30 ok	31 ok	22,000,000	38 ok	27,000,000	47ok	25,000,000	47ok	70,000,000	47ok	70,000,000				
		12070120	Penyediaan jasa Tenaga administrasi / teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi / teknis perkantoran	6 orang	6 orang	197,200,000	197,200,000	9 orang	234,700,000	9 orang	291,400,000	9 orang	291,400,000					



3	05	7	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal	100%	100%	148,000,000	100%	9,000,000	100%	4,000,000	100%	474,942,000	100%	474,942,000	100%	474,942,000	
1.20	7	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	Jumlah Mobil Jabatan	6 unit	-	-	-	-	-	1 unit	451,942,000	1 unit	451,942,000	1 unit	451,942,000		
					Jumlah Motor Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	15 unit	-	15 unit	-		
1.20	7	02	10	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	100 buah	-	-	-	-	-	116 bh	-	50 buah	-	20 bh	-		
1.20	7	02	22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1 kali	1 kali	4,000,000	1 kali	5,000,000	1 kali	1 kali	15,000,000	1 kali	15,000,000	1 kali	15,000,000		
1.20	7	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor diperbaiki	5 jenis	5 jenis	4,000,000	5 jenis	4,000,000	5 jenis	4,000,000	5 jenis	8,000,000	5 jenis	8,000,000	5 jenis	8,000,000	
1.20	7	02	31	Penyediaan Sewa gedung kantor	Jumlah bulan sewa gedung kantor	12 bulan	12 bulan	140,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20	7	02	42	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20	7	02	45	Pengadaan Teknologi Informasi pengawasan	Jumlah Teknologi Informasi pengawasan	-	-	-	-	-	1 set	40,600,000	-	-	1 Paket	-	1 Paket	-	
3	05	7	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase rata-rata tingkat kehadiran dan kedisiplinan berpakaian dinas	100%	100%	25,000,000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	39,000,000	100%	39,000,000	
1.20	7	03	02	Pengadaan Pakaian Batik beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Batik beserta perlengkapannya	50 Stell	50 Stell	25,000,000	-	-	-	60 Stell	36,000,000	-	-	-	-	-	
1.20	7	03	06	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya	50 Stell	50 Stell	25,000,000	-	-	-	-	-	65 Stell	39,000,000	65 Stell	39,000,000		
3	05	7	05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi / kualifikasi pada unit kerjanya	100%	100%	250,000,000	100%	-	100%	95,000,000	100%	-	100%	100,000,000	100%	100,000,000	
1.20	7	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta Pendidikan dan pelatihan formal	20 orang	20 orang	250,000,000	-	-	10 orang	95,000,000	-	-	-	-	-	-	
1.20	7	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah yang mengikuti pelatihan BIMTEK	-	-	-	-	-	-	-	-	10 Orang	100,000,000	10 Orang	100,000,000		
3	05	7	06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai UKIP	85	85	25,000,000	85.5	5,000,000	86	5,000,000	90.0	37,500,000	90.0	25,000,000	90.0	25,000,000	
1.20	7	06	05	Sosialisasi kinerja program SKPD	Jumlah Sosialisasi kinerja program SKPD melalui pameran yang diikuti	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	20,000,000	-	-	-	-		
1.20	7	06	09	Penyusunan Dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan laporan capaian Kinerja dan lhtisar realisasi kinerja SKPD	5 dokumen	5 dokumen	25,000,000	1 Tahun	5,000,000	5 Dok	5,000,000	5 dokumen	17,500,000	5 dokumen	25,000,000	5 dokumen	25,000,000	
Menurunnya Temuan Audit Kinerja OPD dibawah Target	3	05	7	20	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Pemeriksaan dengan temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	5,458,880,000	100.0%	4,688,547,000	100%	4,616,120,000	100.0%	5,366,000,000	100%	5,429,000,000	100%	5,429,000,000
1.20	7	20	01	Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala (Obrik yang diperiksa)	Jumlah Pengawasan internal secara berkala (Obrik yang diperiksa)	60 obrik	3 Sub Kegiatan	2,520,640,000	3 Sub Kegiatan	1,698,370,000	60 obrik	2,079,300,000	60 obrik	2,230,000,000	60 obrik	2,230,000,000	60 obrik	2,230,000,000	
1.20	7	20	02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintahan daerah	Jumlah kasus pengaduan yang ditangani	35 kasus	1 Tahun	968,800,000	1 Tahun	978,918,000	40 kasus	725,000,000	40 kasus	845,000,000	40 kasus	845,000,000	40 kasus	845,000,000	
1.20	7	20	04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Jumlah kasus penanganan di wilayah pemerintahan dibawahnya	100 kampung	100 kampung	847,500,000	100 kampung	800,355,000	100 kampung	770,700,000	100 kampung	1,195,000,000	100 kampung	1,195,000,000	100 kampung	1,195,000,000	



1	20	7	20	05	Inventarisasi temuan pengawasan	Jumlah Laporan Inventarisasi temuan pengawasan	4 laporan	3 Sub Kegiatan	220,600,000	3 Sub Kegiatan	248,692,000	12 Bulan	165,250,000	4 laporan	192,000,000	4 laporan	200,000,000	4 laporan	200,000,000	
1	20	7	20	06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah temuan yang ditindak lanjuti	12 Kali	1 Tahun	515,840,000	1 Tahun	266,100,000	12 Kali	275,000,000	12 Kali	274,000,000	12 Kali	274,000,000	12 Kali	274,000,000	
1	20	7	20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah Koordinasi pengawasan dan saber pungli	24 kali	3 Sub Kegiatan	264,000,000	3 Sub Kegiatan	683,600,000	24 kali	510,000,000	24 kali	480,000,000	24 kali	500,000,000	24 kali	500,000,000	
1	20	7	20	08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah temuan yang dievaluasi	2 kali	1 Tahun	121,500,000	1 Tahun	12,512,000	2 kali	90,870,000	2 kali	65,000,000	2 kali	65,000,000	2 kali	65,000,000	
1	20	7	20	09	Pembinaan, Identifikasi dan Penilaian Resiko Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pembinaan, Identifikasi dan Penilaian Resiko Perangkat Daerah	12 OPD	-	-	-	-	-	-	-	12 OPD	50,000,000	12 OPD	70,000,000	12 OPD	70,000,000
1	20	7	20	10	Pemberian/ Pelayanan Jasa Advice Pengawasan	Jumlah jenis jasa advice pengawasan yang dilaksanakan	2 jenis keg	-	-	-	-	-	-	-	2 jenis keg	35,000,000	2 jenis keg	50,000,000	2 jenis keg	50,000,000
1	20	7	20	11	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Jumlah Kegiatan yang di monitoring dan dievaluasi	2 jenis keg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	20	7	20	12	Pembinaan dan Pengendalian Gratifikasi	Jumlah Sosialisasi Pembinaan dan Pengendalian Gratifikasi	1 jenis keg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	05	02	21		Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang bersertifikat	Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	100%	100%	985,922,000	100%	156,000,000	100%	343,480,000	100%	1,688,520,000	100%	1,747,520,000	100%	1,747,520,000	
					Level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP	level 2	level 2		level 2		level 2		level 3		level 3		level 4			
1	1	02	21	01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah peserta Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan	20 orang	20 orang	512,345,000	20 orang	156,000,000	33 orang	225,000,000	21 orang	1,047,900,000	21 orang	1,047,900,000	21 orang	1,047,900,000	
1	1	02	21	03	Pelatihan teknis pengawasan	Jumlah peserta Pelatihan teknis pengawasan	20 orang	20 orang	422,270,000	-	-	-	-	-	10 orang	162,780,000	10 orang	162,780,000	10 orang	162,780,000



1	1	02	21	04	Pengembangan wawasan aparat pengawas internal pemerintah daerah	Jumlah peserta Pengembangan wawasan aparat pengawas internal pemerintah daerah	4 orang	5 orang	51,307,000	-	-	-	-	23 Orang	277,840,000	23 Orang	277,840,000	23 Orang	277,840,000
1	1	02	21	05	Sosialisasi, peningkatan maturitas SPIP dan	Penilaian level peningkatan maturitas SPIP	0	0	-	-	-	2 jns keg	118,480,000	2 jns keg	200,000,000	2 jns keg	259,000,000	2 jns keg	259,000,000
									8,726,271,000	6,147,625,000	6,263,600,000		8,796,962,000	9,973,660,000	9,973,660,000	9,973,660,000			

Tanjung Redeb, 02 September 2019



Inspektur,
Ir.H.Riza Fakhmi
 Pembina TK.I
NIP. 19671001 199803 1 007



RENCANA AKSI INSPEKTORAT 2019

No.	Sasaran Strategis			Program	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan					Aksi	Ket
	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17
1	Menu runnya Temuan yang Berindikasi Tindakan Pidana Korupsi	Jumlah Temuan yang Berindikasi Tindakan Pidana Korupsi	10 Temuan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Presentase Pemeriksaan dengan temuan yang ditindak lanjuti	100 %	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Pengawasan Internal Secara Berkala	Obrik	20	2,230,000,000	Melaksanakan kegiatan sesuai target dengan efektif, efisien dan ekonomis	
										20			
										10			
										10			
				Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengaduan yang ditangani	Kasus	10	845,000,000	Melaksanakan kegiatan sesuai target dengan efektif, efisien dan ekonomis				
							10						
							10						
							10						



							Penangan Kasus Pada Wilayah Pemerint ahan dibawahn ya	Jumlah Kampung yang ditangani Penangan an Kasus	Kampun g	25 25 25 25	1,195,000, 000	Melaksanakan kegiatan sesuai target dengan efektif, efesien dan ekonomis	
							Inventaris asi Temuan Pengawa san	Jumlah Pengadua n yang ditangani	Laporan	1 1 1 1	192,000,00 0	Melaksanakan kegiatan sesuai target dengan efektif, efesien dan ekonomis	
							Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawa san	Jumlah Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Pengawas an	Kali	3 3 3 3	274,000,00 0	Melaksanakan kegiatan sesuai target dengan efektif, efesien dan ekonomis	
							Koordina si Pengawa san yang	Jumlah Koordinasi Pengawas an dan	Kali	6 6	480,000,00 0	Melaksanakan kegiatan sesuai target dengan	



							lebih Komprehensif	Saber Pungli		6		efektif,efesien dan ekonomis	
										6			
							Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah Temuan yang Dievaluasi	Kali	11	65,000,000	Melaksanakan kegiatan sesuai target dengan efektif, efesien dan ekonomis	
									10				
									10				
									10				
							Pembinaan,Identifikasi dan penilaian resiko perangkat daerah	Jumlah Laporan identifikasi dan penilaian resiko	OPD	3	50,000,000	Melaksanakan kegiatan sesuai target dengan efektif, efesien dan ekonomis	
									3				
									3				
									3				
							Pemberian/Pelayanan Jasa Advice Pengawasan	Jumlah Pelayanan yang dilakukan	Kegiatan	1	35,000,000	Melaksanakan kegiatan sesuai target dengan efektif, efesien dan ekonomis	
									1				
									0				
									0				



2	Menu run nya temu an audit kinerja OPD diba wah target	Jumla h OPD denga n Kinerja dibawah Target	10 Te mu an	Program Peningka tan Profesionalisme Tenaga Pemeriks a dan Aparatur Pengawa san	Meningka tnya profesio nalisme tenaga pemeriks a dan aparatur pengawa san	87%	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriks a dan Aparatur Pengawa san	Jumlah peserta pelatihan	Orang	6	1,047,900,000	Melaksanakan kegiatan sesuai target dengan efektif, efesien dan ekonomis
							5					
							5					
							5					
							Pelatihan Tekhnis Pengawa san dan Penilaian Akuntabili tas Kinerja	Jumlah Peserta Pelatihan Teknis	Orang	3	162,780,000	Melaksanakan kegiatan sesuai target dengan efektif, efesien dan ekonomis
							3					
							2					
							2					
							Pengemb an Wawasa n Aparat Pengawa san Internal Pemerint ah Daerah	Jumlah Peserta Pengemb an Wawasan Aparat Pengawas an Internal Pemerinta h Daerah	Orang	-	277,840,000	Melaksanakan kegiatan sesuai target dengan efektif, efesien dan ekonomis
							-					
							-					
							30					
							Sosialisa si,Pening katan Maturitas	Penilaian Level Peningkat an	Kegiata n	1	200,000,000	Melaksanakan kegiatan sesuai target dengan efektif,
							-					



								5		efesien dan ekonomis		
								5				
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang Dicitak	Buah	20	15,000,000	Melaksanakan kegiatan sesuai target dengan efektif, efesien dan ekonomis	
								20				
								15				
								15				
						Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jenis Peralatan Listrik yang disediakan	Jenis	2	3,000,000	Melaksanakan kegiatan sesuai target dengan efektif, efesien dan ekonomis	
								1				
								1				
								1				
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor	Unit	2	451,361,000	Melaksanakan kegiatan sesuai target dengan efektif, efesien dan ekonomis	
								1				
								1				
								1				



								6			
								13	70,000,000	Melaksanakan kegiatan sesuai target dengan efektif, efisien dan ekonomis	
							13				
							11				
							10				
								9	291,400,000	Melaksanakan kegiatan sesuai target dengan efektif, efisien dan ekonomis	
							9				
							9				
							9				
					80%			-	451,942,000	Melaksanakan kegiatan sesuai target dengan efektif, efisien dan ekonomis	
							-				
							-				
							1				
								-			
								-			



				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Rata2 Tingkat Kehadiran dan Kedisiplinan Berpakai an Dinas	100 %	Pengada an Pakaian dinas beserta perleng k apannya	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengka pannya yang dibayarka n	Stell	-	39,000,000	Melaksanakan kegiatan sesuai target dengan efektif, efesien dan ekonomis
										-		
										-		
										60		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Aparatur yang Memenuh i Standar Kompetensi/ Kualifikas i Pada Unit Kerjanya	87%	Pendidik an dan pelatihan formal	Jumlah Peserta Pendidika n dan pelatihan formal yang mengikuti	Orang			
							Sosialisa si Peratura n Perunda ng - Undanga n	Jumlah yang mengikuti pelatihan BIMTEK	Orang			



				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP	86,5	Penyusunan Dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	5	25,000,000	Melaksanakan kegiatan pelaporan sesuai target dengan efektif, efisien dan ekonomis				
							Sosialisasi kinerja program SKPD	Jumlah Sosialisasi kinerja program SKPD melalui pameran yang diikuti	Kali	-	20,000,000	Mengikuti kegiatan pameran yang diadakan Pemerintah Kabupaten Berau				
										-						
										-						
										1						

Tanjung Redeb, 02 Januari 2019
 Inspektur Inspektorat

Drs.H.Suriansyah,MM

Pembina Utama Madya

NIP 19590408 198501 1 002



RANGKUMAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis						Program / Kegiatan						Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)	
	Uraian	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Tar get	Realisasi	Capaian Kinerja	Uraian	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Tar get	Realisasi	Capaian Kinerja (%)				
1	2		2				4			5			6	9	10	
1	Menurunnya temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	Jumlah temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi;	Temuan	10	0	100%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Pemeriksaan dengan temuan yang ditindak lanjuti			256	237	93,24	5,366,000,000	4,795,630,513	89,37
							Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala	Jumlah Pengawasan internal secara berkala (Obrik yang diperiksa)	obrik		60	60	100.00	2,230,000,000	2,161,169,847	96.91
							Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah kasus pengaduan yang ditangani	kasus		40	29	72.50	845,000,000	776,416,400	91.88
							Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Jumlah kampung ditangani penanganan kasus	kampung		100	100	100.00	1,195,000,000	1,033,695,000	86.50
							Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan	laporan		4	4	100.00	192,000,000	186,678,593	97.23



Inspektorat Kabupaten Berau

							Inventarisasi temuan pengawasan								
							Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah temuan yang ditindak lanjuti	temuan	12	12	100.00	274,000,000	201,188,009	73.43
							Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah Koordinasi pengawasan dan saber pungli	kali	24	16	66.67	480,000,000	311,548,756	64.91
							Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah temuan yang dievaluasi	temuan	2	2	100.00	65,000,000	57,328,908	88.20
							Pembinaan, Identifikasi dan penilaian resiko perangkat daerah	Jumlah Laporan identifikasi dan penilaian resiko	OPD	12	12	100.00	50,000,000	32,900,000	65.80
							Pemberian/Pelayanan Jasa Advice Pengawasan	Jumlah Pelayanan yang dilakukan	Kegiatan	2	2	100.00	35,000,000	34,705,000	99.16
2	Menurunnya temuan audit kinerja OPD di bawah target	Jumlah OPD dengan kinerja di bawah target.	OPD	10	0	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik		2,922	2902	97	2,117,038,000	1,847,041,898	91,97
							Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang bermaterai /berperangko	lembar	583	583	100.00	5,580,000	5,023,500	90.03
							Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	100.00	198,600,000	146,665,299	75.85
							Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diservice, ganti suku cadang, KIR dan mendapat	unit	31	31	100.00	360,000,000	332,020,324	92.23



Inspektorat Kabupaten Berau

--	--	--	--	--

	BBM							
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan tim penilai angka kredit fungsional	orang	23	23	100.00	129,808,000	114,682,000	88.35
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang dibersihkan	m2	1,438	1438	100.00	5,330,000	5,330,000	100.00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	unit	5	5	100.00	25,000,000	24,724,000	98.90
Penyediaan alat tulis kantor	Jenis ATK yang disediakan	jenis	20	20	100.00	83,000,000	83,000,000	100.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Dokumen yang dicetak	buah	70	52	74.29	15,000,000	14,991,500	99.94
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jenis Peralatan Listrik yang disediakan	jenis	5	5	100.00	3,000,000	3,000,000	100.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor	unit	5	5	100.00	451,361,000	416,493,470	92.29
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga	buah	9	8	88.89	6,500,000	5,467,000	84.11



Inspektorat Kabupaten Berau

--	--	--	--	--

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Jumlah Bacaan yang disediakan	ekse mplar	600	600	100.00	3,000,000	3,000,000	100.00
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan rapat dan tamu	kali	37	37	100.00	69,459,000	69,458,400	100.00
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Kordinasi Dan konsultasi keluar daerah	ot	28	28	100.00	400,000,000	399,184,576	99.80
Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	ok	47	47	100.00	70,000,000	70,000,000	100.00
Penyediaan jasa Tenaga administrasi / teknis perkantoran	Jumlah Tenaga administrasi / teknis perkantoran	orang	9	8	88.89	291,400,000	253,986,280	87.16
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal		7	7	100.00	474,942,000	462,528,000	97.38
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan	Unit	1	1	100.00	451,942,000	439,942,000	97.34
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor yang dibayarkan	kali	1	1	100.00	15,000,000	14,694,500	97.96



--	--	--	--	--

	ikhtisar realisasi kinerja SKPD							
Sosialisasi kinerja program SKPD	Jumlah Sosialisasi kinerja program SKPD melalui pameran yang diikuti	kali	1	1	100.00	20,000,000	20,000,000	100.00
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		74	90	107,74	1,688,520,000	1,153,104,257	92,68
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah peserta Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	orang	21	40	190.48	1,047,900,000	1,043,186,172	99.55
Pelatihan teknis pengawasan	Jumlah peserta Pelatihan teknis pengawasan	orang	21	19	90.48	162,780,000	109,918,085	67.53
Pengembangan wawasan aparat pengawas internal pemerintah daerah	Jumlah peserta Pengembangan wawasan aparat pengawas internal pemerintah daerah	orang	30	30	100.00	277,840,000	273,858,902	98.57



Inspektorat Kabupaten Berau

					Sosialisasi, peningkatan maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP	Peningkatan Level	kegiatan	2	1	50.00	200,000,000	138,081,210	69.01
TOTAL								3,325	3,301	99,60	9,720,000,000	8,328,749,489	90,95

Tanjung Redeb, 20 Januari 2020
Inspektur Inspektorat Kab Berau,

Inspektur,


Ir.H.Riza Fakhmi
Pembina TK.I
NIP. 19671001 199803 1 007

**Tabel Pengukuran Pencapaian Indikator dan Target Program
Tahun 2019**

No.	Program	Indikator	Rencana Tingkat capaian (Target)	Realisasi %	Ket
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja Internal yang terlayani dengan baik	100%	94,16	T
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal	80%	97,98	T
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai Sesuai Jam Kerja	100%	98,33	T
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal	-	-	-
5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKjIP	87 A	95,46 AA	T
6	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Pemeriksaan dengan temuan yang ditindaklanjuti	87%	84,89	T
7	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	100%	100%	T
Level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP			3	3	T

Tanjung Redeb, 27 Januari 2020

Inspektur,

Ir.H.Riza Fakhmi
Pembina TK.I
NIP. 19671001 199803 1 007



Tabel Hasil Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Berau Tahun 2019

No	Bidang Urusan	Jumlah Program	Rata-Rata Tingkat Capaian Target RKPD (%)		Predikat Kinerja		Ket	
			K	Rp.	%	N		
1	INSPEKTORAT Urusan wajib Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian	7 Program terdiri dari :						
		1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	91,97	2,117,038,000	97	T	Sub Bag Umpeg
		2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	97,38	474,942,000	100	ST	Sub Bag Umpeg
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	98,33	36,000,000	98,33	T	Sub Bag Umpeg
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	Sub Bag Umpeg
		5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	93,45	37,500,000	100	ST	Sub Bag.Penyusunan Program
		6	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	89,37	5,366,000,000	93,24	T	Sub Bag.Penyusunan Program
		7	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	92,68	1,688,520,000	107,74	ST	Sub Bag Umpeg
Rata rata capaian RKPD TH 2018			93,86	9,720,000,000	297	ST		

Tanjung Redeb, 27 Januari 2020

Inspektur,


Ir.H.Riza Fakhmi
 Pembina TK.I
 NIP. 19671001 199803 1 007



**REALISASI PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH TAHUN 2019**

TAHUN 2019				
PKPT		REALISASI		
No. Urut	OBRIK	No. Urut	IP	OBRIK
I.1	Pengawasan Internal Secara Berkala pada SKPD	I.1	47	Pengawasan Internal Secara Berkala pada SKPD
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Kecamatan Biatan	2	1	Kecamatan Biatan
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	3	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
4	Kecamatan Maratua	4	1	Kecamatan Maratua
5	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	5	1	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8	Dinas Pengendalian Penduduk, KBPP dan Perlindungan Anak	8	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KBPP dan Perlindungan Anak
9	Dinas Penanaman Modal PTSP	9	1	Dinas Penanaman Modal PTSP
10	Kecamatan Tabalar	10	1	Kecamatan Tabalar
11	Dinas Pangan	11	1	Dinas Pangan
12	Kecamatan Pulau Derawan	12	1	Kecamatan Pulau Derawan
13	Kecamatan Batu Putih	13	1	Kecamatan Batu Putih
14	Kecamatan Tanjung Redeb	14	1	Kecamatan Tanjung Redeb
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	15	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
16	Kecamatan Teluk Bayur	16	1	Kecamatan Teluk Bayur
17	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	17	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20	Kecamatan Segah	20	1	Kecamatan Segah
21	Kecamatan Sambaliung	21	1	Kecamatan Sambaliung
22	Dinas Pertanian dan Peternakan	22	1	Dinas Pertanian dan Peternakan
23	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	23	1	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
24	Dinas Perikanan	24	1	Dinas Perikanan
25	Dinas Sosial	25	1	Dinas Sosial
26	Dinas Pertanahan	26	1	Dinas Pertanahan
27	Kecamatan Biduk-Biduk	27	1	Kecamatan Biduk-Biduk
28	Sekretariat DPRD	28	1	Sekretariat DPRD
29	Badan Pendapatan Daerah	29	1	Badan Pendapatan Daerah
30	Dinas Kepemudaan & Olahraga	30	1	Dinas Kepemudaan & Olahraga
31	Satuan Polisi Pamong Praja	31	1	Satuan Polisi Pamong Praja



32	Kecamatan Kelay	32	1	Kecamatan Kelay
33	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	33	1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
34	Dinas Perhubungan	34	1	Dinas Perhubungan
35	Dinas Perkebunan	35	1	Dinas Perkebunan
36	Sekretariat Korpri	36	1	Sekretariat Korpri
37	Dinas Pendidikan	37	1	Dinas Pendidikan
38	Dinas Kesehatan	38	1	Dinas Kesehatan
39	Badan Kesbangpol	39	1	Badan Kesbangpol
40	Dinas Kominfo	40	1	Dinas Kominfo
41	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	41	1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
42	RSUD Dr. Abdul Rivai	42	1	RSUD Dr. Abdul Rivai
43	DPUPR	43	1	DPUPR
44	Kecamatan Talisayan	44	1	Kecamatan Talisayan
45	Kantor Penghubung	45	1	Kantor Penghubung
46	Sekretariat Daerah	46	1	Sekretariat Daerah
47	Kecamatan Gunung Tabur	47	1	Kecamatan Gunung Tabur
1.2	Reviu Laporan Keuangan Pemda/ SKPD	1.2	1	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemkab Berau
		48		
1.3	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/SKPD	1.3	1	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		49		
1.4	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1.4	1	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
1.5	Reviu Revisi RPJMD	1.5	1	Reviu Revisi RPJMD
		51		
1.6	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1.6	1	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
		52		
1.7	Pendampingan Penilaian Risiko 12 OPD	1.7	12	Pendampingan Penilaian Risiko 12 OPD
		53		
1.8	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sistem AKIP) dan pencapaian kinerja organisasi (Evaluasi Lakip semua Dinas, Badan, Sekretariat dan Kantor Pemerintah Kabupaten Berau)	1.8	47	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sistem AKIP) dan pencapaian kinerja organisasi (Evaluasi Lakip semua Dinas, Badan, Sekretariat dan Kantor Pemerintah Kabupaten Berau)
		54	12	LAKIP pada Disbun, Satpol PP, Disnakertrans, Kesbangpol, Diskoperindag, DPMPPT Satu Pintu, BPBD, Kec. Biduk-Biduk, Kec. Tabalar, Kel. Gayam, Kel. Gunung Tabur, Kel. Gunung Panjang
		55	3	Evaluasi LAKIP pada Kec. Tanjung Redeb, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		56	7	Evaluasi LAKIP pada Sekretariat DPRD, Dinas Pemuda & Olah Raga, BAPLITBANG, Sekretariat Daerah, Kec. Biatan, Kec. Batu Putih, Dinas Pendidikan



		57	14	Evaluasi LAKIP pada DPP-KB-PP&PA, Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan/RSUD, DPMK, BPKAD, Bapenda, Inspektorat, Kec. Kelay, Kec. Segah, Kec. Teluk Bayur, Kec. Sambaliung, Kec. Talisayan
		58	12	Evaluasi LAKIP pada Dinas Pangan, Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kelautan, Dinas PU & Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Dinas Perhubungan, BKPP, Kec. Gunung Tabur, Kec. Pl. Derawan, Kec. Maratua, Dinas Pertanahan
1.9	Sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Wilayah Kabupaten Berau - (80 Sekolah penerima BOSDA)	1.7	80	Sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Wilayah Kabupaten Berau - (80 Sekolah penerima BOSDA)
		59		
1.10	Reviu RKA Perubahan APBD 2019 (Semua Dinas, Badan, Sekretariat dan Kantor Pemerintah Kabupaten Berau)	1.10		Reviu RKA Perubahan APBD 2019 (Semua Dinas, Badan, Sekretariat dan Kantor Pemerintah Kabupaten Berau)
		60		
1.11	Reviu RKA mumi APBD 2019 (Semua Dinas, Badan, Sekretariat dan Kantor Pemerintah Kabupaten Berau)	1.11	1	Reviu RKA mumi APBD 2019 (Semua Dinas, Badan, Sekretariat dan Kantor Pemerintah Kabupaten Berau)
		61		
1.12	Review RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2019 Kabupaten Berau	1.12	1	Review RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2019 Kabupaten Berau
		62		
II.	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	II	23	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
		63		
III.	Pemeriksaan Khusus Pemerintah Dibawahnya (100 Kampung)	III	100	Pemeriksaan Khusus Pemerintah Dibawahnya (100 Kampung)
		64		
		65	4	Pemeriksaan ADK Wil. Kec.Teluk Bayur
		66	10	Pemeriksaan ADK Wil. Kec.Talisayan
		67	4	Pemeriksaan ADK Wil. Kec. Maratua
		68	13	Pemeriksaan ADK Wil. Kec. Sambaliung
		69	6	Pemeriksaan ADK Wil. Kec. Tabalar
		70	5	Pemeriksaan ADK Wil. Kec. Pulau Derawan
		71	12	Pemeriksaan ADK Wil. Kec. Segah
		72	8	Pemeriksaan ADK Wil. Kec. Batu Putih
		73	8	Pemeriksaan ADK Wil. Kec. Biatan
		74	6	Pemeriksaan ADK Wil. Kec. Biduk-Biduk
		75	10	Pemeriksaan ADK Wil. Kec. Gunung Tabur
JUMLAH			316	

Tanjung Redeb, 27 Januari 2020

**Ir.H.Riza Fakhmi**

Pembina TK.I

NIP. 19671001 199803 1 007



